



Harian

JAYA POS

Perubahan Menuju Kemajuan **TERVERIFIKASI DEWAN PERS**

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E., MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 836 TAHUN XIX, 13 - 19 APRIL 2026

www.harianjayapos.com

HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Bupati Tanjabbar Serahkan 71 Sertifikat Tanah Konsolidasi untuk Warga Kecamatan Teluk Nilau

Kualatungkal, Jaya Pos

Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyerahkan sebanyak 71 sertifikat tanah hasil konsolidasi kepada masyarakat Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, dalam acara yang digelar di Aula Kantor Camat Pengabuan, Rabu (08/04/26).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari pro-

▶▶ Halaman 5



Bupati Anwar Sadat Saat Serahkan Sertifikan ke Warga.

Tidak Ada Diskriminasi di Program Bantuan Berdaya Didik

Banjar, Jaya Pos

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, pada tahun ini akan kembali menggelontorkan bantuan program berdaya didik untuk siswa SD dan SMP. Namun program bantuan berdaya didik ini belum menjangkau siswa madrasah di Kota Banjar.

Bantuan berdaya didik tersebut akan menjangkau 2.000 siswa SD dan SMP dengan nilai bantuan masing-masing Rp 500 ribu untuk siswa SD dan Rp 1 juta untuk siswa SMP.

▶▶ Halaman 5



Wakil Wali Kota Banjar Supriana

PERPANJANG RANTAI PASOK MODUS KORUPSI PETRAL RUGIKAN NEGARA



Konferensi pers Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008-2015 di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kejagung mengungkap, perpanjangan rantai pasokan itu menyebabkan kemahalan harga, sehingga Pertamina atau negara Indonesia rugi.”

Jakarta, Jaya Pos

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus yang digunakan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang tahun 2008-2015. Dalam kasus ini, dugaan korupsi dilakukan delapan tersangka, di mana salah satunya adalah pengusaha Mohammad Riza Chalid alias MRC yang hingga kini buron.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi, menyatakan bahwa tindak pidana ditemukan pada pengadaan Gasolin 88 (Premium) dan Gasolin 92 (Pertamax). Dalam pengadaan itu, kata dia, tersangka memanjangkan rantai pasokan.

“Perpanjangan rantai pasokan itu menyebabkan kemahalan harga, sehingga Pertamina atau negara Indonesia rugi di situ. Kemudian

▶▶ Halaman 5

Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Pegawai

Belitung, Jaya Pos

Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Royhan Al Faisal, menegaskan Lapas Kelas II B Tanjungpandan berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM Pegawai Lapas yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, Lapas Kelas IIB Tanjungpandan menggelar prosesi pengukuhan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode Maret dan April tahun 2026, bertempat di halaman kantor Lapas Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kep Babel, Kamis (9/4).

Kegiatan dipimpin Kalapas IIB Tanjung Pandan Royhan Al Faisal, sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen kinerja aparat sipil negara.

Sebanyak 20 pegawai menerima kenaikan pangkat yai-



Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Royhan Al Faisal kukuhkan kenaikan pangkat PNS

tu, Royhan Al Faisal, Nopianto, Hasbullah, Sony Irmawan, Agus Kurniawan, Novantheo Yumas, Abdu Salim, Iis Setiawan, Anam Nur Wicaksono, Hari Kurniawan, Mokhammad Abimanyu Kusumawardana, Agung Samudra, Nero Akbar Rezy, Firman Sarfaludin, Ivan Chandra, Farodis Karomi,

Aip Saepudin Jamalulail, Imanda Federaga, Ardy Arya Pratama, dan Shendyka Padmanegara.

Royhan Al Faisal menegaskan kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi amanah yang harus diiringi pening-

▶▶ Halaman 5

Bank Sulteng Cabang Tolitoli Buka Layanan Kesehatan Gratis, Warga Antusias

Tolitoli, Jaya Pos

Bank Sulteng Cabang Tolitoli menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Program pelayanan kesehatan gratis ini telah dibuka sejak awal Januari 2026 dan kembali digelar pada 7 April 2026. Layanan tersebut terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat yang datang ke kantor Bank Sulteng Cabang Tolitoli dapat langsung memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Tenaga medis yang bertugas, Dokter Anisah, didampingi perawat Yudha, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus komit-



Bank Sulteng Tolitoli melayani pengobatan gratis.

men perusahaan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Pelayanan ini kami buka untuk umum. Masyarakat bisa datang langsung untuk memeriksakan kesehatannya tanpa biaya. Kami

ingin membantu masyarakat agar lebih mudah memantau kondisi kesehatannya,” ujar dr. Anisah saat ditemui di lokasi pelayanan.

Adapun jenis layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan

▶▶ Halaman 5

Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Paket I Rp 321,1 M Molor Disdik DKI Jadikan LKPP, BPKP dan BPK Benteng Pertahanan?

Jakarta, Jaya Pos

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mencari perlindungan, membuat instansi berwenang menjadi benteng pertahanan atas keterlambatan pelaksanaan rehab total gedung sekolah Paket I, tahun 2025 wilayah Jakarta Barat sebesar Rp 321,1 miliar.

Sebagaimana kontraktor pelak-

sana yang mengerjakan proyek, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan masa kontrak sampai dengan 5 April 2026, namun hingga berita ini diturunkan pekerjaan belum terselesaikan.

Proyek hasil lelang konsolidasi ini terdiri dari pembangunan kawasan SDN Tegal Alur 02/04 dan USB SMP; rehab total SDN Jati Pulo 07

dan alih fungsi SDN 08 Pagi menjadi USB SMP; rehab total SMAN 33 Jakarta; rehab total SMPN 130 Jakarta dan SDN Kota Bambu 01/02; rehab total TK Negeri Meruya Selatan-Jakarta Barat, dengan total harga kontrak sebesar Rp 321.162.000.000.

Ketika hendak dikonfirmasi terkait keterlambatan pekerjaan ini, Kepala Unit Pengelola Prasarana dan

Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Budi-yono, mempercayakan dua stafnya, Wawan dan Yanto guna memberikan penjelasan kepada wartawan, di kantornya.

Menurut Wawan, keterlambatan

▶▶ Halaman 5



Rehab total gedung SDN 02_04 Tegal Alur dan USB SMP. (Foto Tbn)

Siskeudes Pondasi Terwujudnya Good Governance Desa di Kabupaten Ciamis

Ciamis, Jaya Pos

Bank Bjb mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui dukungan penuh Bank Bjb dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi perangkat desa se-Kabupaten Ciamis di kantor Bank Bjb, Rabu (8/4).

Kegiatan strategis ini

dihadiri oleh DPMD Kabupaten Ciamis yang diwakili Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sutiawan SIP. Para Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Ciamis juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Fokus utama pertemuan ini adalah mengakselerasi kapasitas aparatur dalam mengelola administrasi keuangan desa melalui instrumen digital yang lebih modern.

Dalam kegiatan ini, Kepala DPMD Kabupaten Ciamis Asep Khalid Fajari SIP, melalui Sekretaris DPMD Sutiawan, menegaskan bahwa inovasi ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi kebutuhan mendesak untuk efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Bjb Kabupaten Ciamis Sonny Permana menjelaskan bahwa Siskeudes bukan sekadar alat teknis, tetapi pondasi utama bagi



Bimtek Siskeudes bagi perangkat desa se Kabupaten Ciamis di kantor Bjb Ciamis. (Foto:Mamay)

terwujudnya good governance di tingkat desa. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Bjb hadir untuk

memastikan seluruh ekosistem keuangan desa berjalan aman, efisien, dan terintegrasi secara digital.

Tak hanya menyentuh aspek teknis aplikasi, Bank Bjb juga membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan elemen ekonomi desa lainnya. Termasuk dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan memusatkan layanan perbankan di Bank Bjb, diharapkan setiap lalu lintas transaksi desa menjadi lebih

terpantau dan minim risiko administratif.

Langkah digitalisasi ini dipandang sebagai jembatan teknologi untuk mempercepat laju ekonomi di pelosok Kabupaten Ciamis. Bank bjb, tandas Sonny, tidak hanya memposisikan diri sebagai penyedia layanan finansial. Tetapi bjb juga sebagai pendamping transformasi digital demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

(Mamay)

Bupati Ciamis Ajak Guru Perkuat Pengawasan Terhadap Penggunaan Gawai Oleh Pelajar



Bupati Ciamis Herdiat Sunarya serahkan penghargaan kepada guru berdedikasi tinggi. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Di tengah semakin masifnya arus digitalisasi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda, Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya mengajak para guru untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh pelajar.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ciamis yang berlangsung di aula STIKes Muhammadiyah Ciamis, Selasa (7/4).

Kegiatan yang mengusung tema "Melalui Halal Bihalal Kita Tingkatkan Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Solidaritas Warga Pendidikan Kabupaten Ciamis" tersebut menjadi momentum penting bagi Bupati Ciamis untuk menyampaikan kekhawatiran sekaligus langkah strategis dalam menghadapi dampak negatif perkembangan teknologi digital terhadap pelajar.

Menurut Bupati Ciamis, saat ini dunia pendidikan tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga tantangan sosial akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ia menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual, perundungan (bullying), serta berbagai pengaruh buruk lainnya yang kian mudah diakses melalui gawai.

"Perkembangan digitalisasi tidak bisa kita hindari, namun harus kita awasi bersama. Saat ini tren kekerasan seksual, bullying, hingga konten negatif lainnya semakin mudah diakses oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam melakukan pembatasan serta pengawasan penggunaan gawai bagi pelajar," tegas Herdiat.

Herdiat menghimbau agar sekolah-sekolah dapat menyusun kebijakan yang lebih tegas dan bijak terkait penggunaan gawai di lingkungan pendidikan, tanpa menghambat pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang positif.

Selain menyoroti isu pendidikan dan perlindungan pelajar, Bupati Ciamis juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dijelaskannya bahwa situasi tersebut menuntut seluruh elemen, termasuk sektor pendidikan, untuk tetap adaptif dan inovatif dalam menjalankan program-program pembangunan. "Meski kondisi APBD saat ini terdampak efisiensi anggaran, kita harus tetap optimis. Dengan kebersamaan, solidaritas, serta inovasi dari para pendidik, saya yakin kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis tetap dapat kita tingkatkan," ungkapnya.

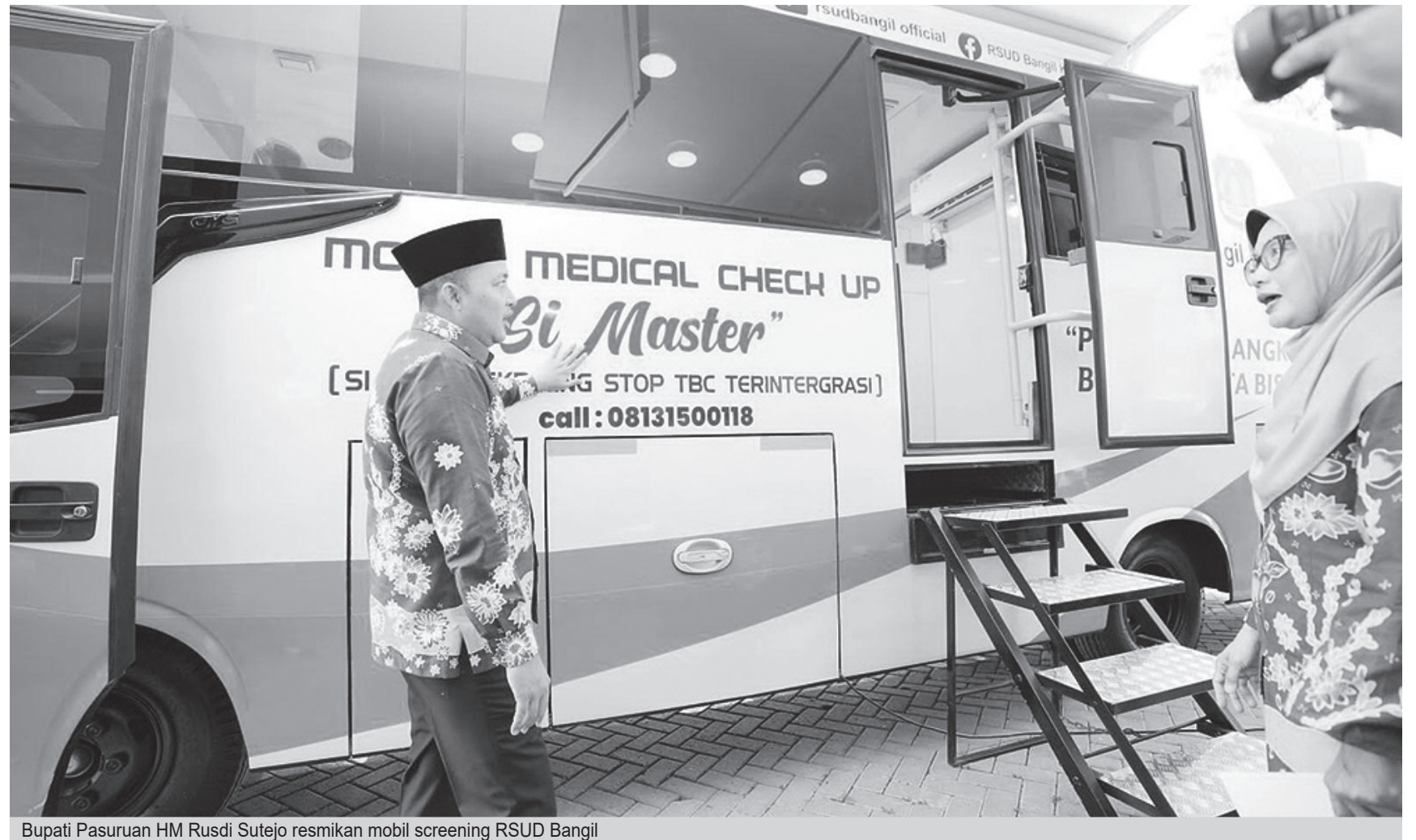
Pada kesempatan tersebut, kegiatan Halal Bihalal PGRI Kabupaten Ciamis juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada guru-guru yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata para pendidik dalam mencetak generasi unggul di Kabupaten Ciamis.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan buku karya penulis esai terbaik hasil karya anggota PGRI Kabupaten Ciamis. Karya tersebut menjadi bukti bahwa para pendidik tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran, tetapi juga aktif dalam pengembangan literasi dan budaya menulis di lingkungan pendidikan.

Suasana kebersamaan semakin terasa ketika kegiatan ditutup dengan tausiyah yang disampaikan oleh mubaligh H Wasdi Izuddin. Dalam tausiyahnya, ia mengajak seluruh warga pendidikan untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, mempererat solidaritas, serta meningkatkan peran pendidik dalam membentuk karakter generasi masa depan.

Melalui momentum Halal Bihalal ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap sinergi antara pemerintah daerah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat semakin kuat dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan generasi muda Ciamis tumbuh sebagai generasi yang berkarakter, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. (Mamay)

Terus Berinovasi, Pemkab Pasuruan Melalui RSUD Bangil Luncurkan Si Master



Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo resmikan mobil screening RSUD Bangil

Pasuruan, Jaya Pos

RSUD Bangil terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan itu kini menambah dua armada layanan kesehatan, yakni mobil Si Master (Si Mobil Skrining Stop TBC Terintegrasi).

Penambahan sarana transportasi tersebut merupakan bagian dari penguatan layanan

di bawah kepemimpinan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Shobih Asrori. Mobil Si Master disiapkan khusus untuk menjemput dan mengantar pasien di area RSUD Bangil.

Layanan ini bertujuan memudahkan pasien, terutama lansia dan pasien dengan keterbatasan fisik, agar tidak perlu berjalan jauh menuju lokasi poli atau ruang pelayanan. Kendaraan tersebut difungsikan sebagai mobil

screening Stop TBC terintegrasi guna mempercepat deteksi dini kasus tuberkulosis (TBC).

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo (Mas Rusdi) mengatakan, kehadiran mobil screening tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat kecamatan dan sekolah-sekolah. "Nantinya screening TBC tidak harus dilakukan di RSUD Bangil. Mobil ini akan berkeliling ke kecamatan

dan sekolah-sekolah sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan," kata Mas Rusdi, Sabtu (14/2).

Mas Rusdi juga meninjau langsung peralatan medis yang tersedia di dalam mobil tersebut. Termasuk perangkat laboratorium screening TBC dan alat rontgen. Ia berharap armada tersebut dapat segera dioperasikan setelah seluruh perizinan, termasuk dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), selesai di-

proses. "Secepatnya akan kami operasionalkan sambil menunggu izin dari Bapeten agar bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat," imbuhnya.

Dengan penambahan dua armada tersebut, ia berharap pelayanan kesehatan menjadi semakin cepat, mudah dijangkau, dan memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat.

(Wio)

Wabup Mojokerto Salurkan Bantuan Material Kepada Warga Terdampak Angin Kencang

Mojokerto, Jaya Pos

Pasca terjadinya bencana angin kencang yang melanda kawasan wilayah Kabupaten Mojokerto di akhir bulan Maret lalu yang menimbulkan dampak kerusakan berat, sedang dan ringan pada beberapa rumah warga membuat pemerintah daerah bergerak cepat dalam mengevaluasi dan memberikan bantuan berupa material bangunan.

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, terjun langsung ke lokasi terdampak guna menyalurkan bantuan yang berupa material bangunan atau konstruksi.

Selain menyalurkan bantuan wabup yang akrab disapa dengan Mas Wabup tersebut menyampaikan bahwa kehadirannya ini bertujuan untuk melihat secara langsung keadaan empat rumah warga yang terdampak bencana angin kencang agar segera bisa diperbaiki, seperti rumah Wasita yang berada di Dusun Banjarsono, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko.

"Kita datang secara langsung ke lokasi bencana ini guna untuk memberikan bantuan material bangunan ke empat rumah warga yang berada di tiga Desa, yaitu Desa Kedungmaling, den-



Wabup serahkan bantuan material korban angin kencang

gan kadesnya kita melihat kondisi rumah yang rusak, dan untungnya tidak sampai menimbulkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan" terangnya.

Sementara untuk rumah warga yang bernama Umar Bakri di Dusun Pesanan, Desa Bicak Kecamatan Trowulan, mengalami kerusakan yang cukup parah serta rumah Eko Hariyanto dan rumah Agus Hendra yang berada di Dusun Ngaglik, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, empat warga

yang rumahnya terdampak bencana angin kencang tersebut mendapatkan bantuan paket bahan bangunan yang bervariasi, tergantung dari kondisi kerusakan bangunan dan kebutuhan perbaikannya, seperti di rumah Umar Bakri, Mas Wabup yang didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Rinaldi Rizal Sabirin, menyalurkan paket bantuan yang terdiri dari asbes, kayu balok, bata merah, pasir pasang dan semen.

Bantuan yang disalurkan

tidak hanya material bangunan saja melainkan juga sembako turut jadi perhatian sebagai bantuan yang disalurkan kepada warga yang terdampak.

Mas Wabup Muhammad Rizal menambahkan, bahwa penyaluran bantuan-bantuan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto, dan ini adalah merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Pemerintah Daerah dibawah

kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa.

"penyaluran bantuan ini adalah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap bencana yang menimpa warganya, kejadian bencana angin kencang seperti ini tercatat hampir terjadi disetiap tahun" tambahnya.

Di akhir sambutannya, Mas Wabup yang berlatar belakang Dokter tersebut mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat agar kiranya selalu waspada dan menjaga kesehatan senantiasa waspada, terutama pada hal kesehatan karena pada bulan April ini diprediksi akan terjadi fenomena alam "el-nino godzilla" yang membuat cuaca akan sangat terasa panas untuk waktu yang cukup lama.

"untuk bulan April ini kedepan diprediksi akan terjadi fenomena alam yaitu berupa badai el nino godzilla, ini musim adalah dikategorikan sebagai musim kemarau atau musim kering yang panjang dan cuacanya bakal terasa sangat panas, untuk itu diharapkan agar seluruh warga masyarakat kiranya bisa lebih menjaga kondisi tubuhnya agar bisa terhindar dari penyakit dehidrasi" pungkasnya.

(Ad)

Tersandung Kasus Korupsi Dana BUMDes Oknum Anggota DPRD Ciamis Ditahan Kejari



Kasi Intelijen Kejari Ciamis Anang bersama Plh Kasi Pidsus Kresna saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (7/4). (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis. Penahanan tersebut dilakukan terkait dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi, beberapa waktu lalu.

Oknum anggota dewan dimaksud diketahui berinisial NZ. Ia diduga melakukan praktik korupsi sebelum menjabat sebagai anggota DPRD, tepatnya saat masih bertugas sebagai pendamping desa pada tahun 2016. Informasi tersebut dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ciamis melalui Kepala Seksi Intelijen Anang, yang didampingi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kresna.

Keduanya menyampaikan keterangan tersebut saat ditemui di ruang kerja Kasi Intelijen, Selasa, (7/4). "Benar, kami dari Kejari Ciamis telah melakukan penahanan terhadap salah satu oknum anggota DPRD Ciamis berinisial NZ," ujar Anang.

Ia menjelaskan, dalam perkara ini NZ tidak bertindak sendiri. Terdapat tiga orang lainnya yang turut diamankan, masing-masing berinisial Y, S, dan A. Keempatnya saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin, Kota Bandung. "Yang bersangkutan bersama tiga orang lainnya sudah diamankan dan saat ini menjalani penahanan di Rutan Sukamiskin," jelasnya.

Anang menyebut bahwa kasus yang menjerat keempat tersangka berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2016. Dalam prosesnya, diduga terjadi pungutan liar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. "Perkara ini berkaitan dengan bantuan BUMDes tahun 2016. Ada dugaan pungutan liar yang berdampak pada kerugian negara," ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, nilai kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 527 juta. "Kerugian negara kurang lebih Rp 527 juta, dan peristiwa itu terjadi ketika yang bersangkutan masih menjadi pendamping desa. Untuk proses hukum selanjutnya, perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan karena persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung," kata Anang.

Sementara itu, menanggapi lamanya rentang waktu antara kejadian dan proses hukum yang berjalan saat ini, pihak Kejari Ciamis menyebut hal tersebut berkaitan dengan tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya. "Prosesnya cukup panjang karena kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Berkas juga sempat kami kembalikan untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diperlukan," tutur Anang.

Ia menegaskan, pihak kejaksaan telah bekerja sesuai prosedur operasional standar (SOP) dalam menjalankan fungsi sebagai penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. "Kami menerima berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap, kami tindak lanjut sesuai kewenangan sebagai penuntut umum," tegasnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antaranya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 603 KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. "Ancaman hukuman pidana bagi para tersangka paling singkat empat tahun penjara," ungkapnya.

Catatan Kritis

Pengamat Sosial Politik Kabupaten Ciamis Saepudin SH MH angkat bicara terkait penahanan oknum anggota DPRD Ciamis aktif, atas dugaan korupsi dana bantuan BUMDes. Aep memberikan apresiasi, sekaligus catatan kritis terhadap penanganan kasus yang dinilai memakan waktu cukup lama tersebut. "Saya mengapresiasi tinggi kinerja Kejari Ciamis atas penetapan penahanan terhadap oknum anggota DPRD aktif, yang terlibat dugaan korupsi dana BUMDes. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan," kata Aep saat dikonfirmasi, Minggu (5/4).

Menurutnya, jika melihat struktur permasalahannya, kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lama sebelum akhirnya menyeret oknum anggota DPRD Ciamis. Meski memahami bahwa kasus korupsi membutuhkan pendalaman materi yang kuat, ia menilai publik berhak tahu mengapa prosesnya terkesan berjalan lambat. "Kasus ini bermula saat ditangani oleh institusi Polri pada tahun 2021, tapi baru mencuat kembali dan dilakukan penahanan di tahun 2026. Maka, molornya penanganan ini harus dijelaskan secara gamblang kepada publik, apa kendala sebenarnya di lapangan," ujar Aep.

Selain menyoroti durasi penanganan hukum, Aep juga mendesak DPRD Ciamis untuk segera mengambil langkah administratif. Menurutnya, lembaga legislatif harus menjaga marwah institusi, dengan merespons cepat status hukum anggotanya. "Pihak DPRD Ciamis harus segera bersikap. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) beserta perubahannya, anggota DPRD wajib diberhentikan sementara jika telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tertentu," tegas Aep.

Ia berharap, proses hukum dugaan korupsi yang menyeret oknum DPRD Ciamis ini berjalan transparan. "Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana desa maupun integritas lembaga legislatif di Ciamis tetap terjaga," pungkasnya. (Mamay)

Kadisbupora Berharap Pagelaran Ekspresi Budaya "Natah Gurat Zaman" Menjadi Sarana Pelestarian Nilai Budaya Lokal

Ciamis, Jaya Pos

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis Dr Dian Budiayana MSI menghadiri pagelaran ekspresi budaya bertajuk "Natah Gurat Zaman" yang diselenggarakan di Situs Gunung Susuru, Kecamatan Cijeungjing, Rabu (8/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program fasilitasi budaya yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui panitia penyelenggara yang diketuai oleh Deni Sonjaya. Pagelaran tersebut menjadi wadah ekspresi seni dan budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kadisbupora hadir didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kebudayaan, Kepala Bidang Kepemudaan, serta Kasubag Umum beserta jajaran staf Disbudpora Kabupaten Ciamis.

Di Situs Gunung Susuru Tahun 2026 ini merupakan bagian dari program Dana Indonesiana kategori Pendayagunaan Ruang Publik dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun program 2025 yang direalisasikan pada tahun 2026.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya lokal sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis. Selain itu, pemanfaatan situs bersejarah sebagai ruang publik budaya juga menjadi langkah strategis dalam menghidupkan kembali warisan



Pertunjukan pagelaran ekspresi budaya Natah Gurat Zaman di situs Gunung Susuru Kecamatan Cijeungjing. (Foto:Mamay)

budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Dalam sambutannya, Kadisbupora Ciamis memaparkan bahwa Situs Gunung Susuru terletak di Kampung Bunder, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menyimpan sejarah yang sangat penting bagi dua daerah, yaitu kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Dengan luas 7 Ha yang dikelilingi oleh 2 sungai di bawahnya, yaitu sungai Cimuntur dan Cileueur, Situs ini merupakan tinggalan punden berundak dari masa kerajaan Hindu (masa klasik) dan juga di sana terletak 3 buah

goa yang mempesona mata dan juga 1 buah sumur dan ada juga peninggalan lainnya seperti manik-manik dan juga keramik.

Situs ini merupakan patilasan dari kerajaan Galuh Kertabumi yang didirikan oleh Putri Tanduran Ageung, putri Raja Galuh Salawe yang bernama Sanghyang Cipta. Sanghyang Cipta menikah dengan Rangga Permana, keponakan Prabu Geusan Ulun, penguasa Kerajaan Sumedang Larang. Wilayah ini adalah sebagai hadiah pernikahan dari sang ayah. Karena berada di pinggir sungai Cimuntur, Rangga Permana, kemudian dikenal sebagai Prabu Di Muntur pada

saat dilantik sebagai raja di tahun 1585 M. Prabu Di Muntur memerintah Kertabumi sampai tahun 1602 M yang kemudian digantikan oleh putranya bernama Sang Raja Cita.

Disebut Gunung Susuru, karena di bukit tersebut banyak tumbuh kembang Susuru, yaitu sejenis kaktus yang hantunya bisa tumbuh di sana. Konon, Susuru merupakan tumbuhan yang menghiasi taman keraton Galuh Kertabumi atau dipergunakan juga tanaman pagar keraton.

Selain menyimpan berbagai peninggalan dari kerajaan galuh, masyarakat Gunung Susuru juga mempunyai salah satu kebiasaan yang

spesial yaitu upacara adat yang diberi nama Merlawu. Prosesi Upacara Adat Merlawu, tandas Dian, sekarang terbagi ke dalam 3 kegiatan inti yaitu yang pertama berziarah ke makam Prabu Dimuntur dan leluhur Desa Kertabumi yang dimakamkan disana, yang kedua yaitu beber sejarah untuk mengingat kembali sejarah Desa kertabumi khususnya pada masa Kerajaan Galuh Kertabumi dan yang ketiga yaitu balacracan yaitu acara makan-makan bersama sambil menikmati pemandangan di wilayah Situs Kertabumi dan menikmati hiburan yang disediakan oleh warga Desa Kertabumi. (Mamay)

Mendukbangga Wihaji Tekankan Pentingnya Peran Keluarga Dalam Investasi SDM

Bandung, Jaya Pos

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan kuliah umum bertema "Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045", Kamis (9/4) dengan melibatkan peserta kegiatan berjumlah 2000 orang yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi, dosen, tenaga pendidikan, Penuluh KB dan mitra kerja aktif Program Bangsa Kencana.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Ali Rasyid, menekankan bahwa kajian hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Penguatan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi sangat relevan dengan bidang keilmuan yang dikem-



Mendukbangga Wihaji beri kuliah bagi 2000 mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Foto:Mamay)

bangkan di fakultas tersebut.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar dalam sambutannya menegaskan bahwa isu kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an, aspek keluarga dan kependudukan menjadi bagian yang penting yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan kehidupan manusia secara berkelanjutan.

Ia juga menyatakan kesediaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam sukseskan program-program pembangunan kependudukan dan keluarga.

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, sebagai pembicara utama dan dilaksanakan secara hybrid di Aula

Anwar Musaddad.

Mendukbangga menyampaikan bahwa Kemendukbangga siap membantu 8 program prioritas Presiden dan fokus pada penanganan serta isu strategis Kemendukbangga untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menguatkan pada pokok bahasannya tentang 74.092.313 Keluarga Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah harus sejahtera melalui program penguatan kualitas keluarga, pencegahan stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan leadership, dinamika pernikahan, Lansia Berdaya serta layanan keluarga berbasis hukum dan nilai keagamaan.

Selain itu, disinggung juga bahwa Bonus Demografi dan tantangan kependudukan

harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong inovasi teknologi. Tanpa strategi ini, melimpahnya penduduk usia produktif berisiko memicu pengangguran tinggi dan bencana ekonomi.

Rangkaian kegiatan disambung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Mamay)

Pentingnya Daya Dukung Memadai Bagi Personel Damkar Saat Bertugas

Sukabumi, Jaya Pos

Jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kabid Pemadam Kebakaran memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tengah keterbatasan personel, armada, hingga Alat Pelindung Diri (APD).

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H Andreas, di Pendopo Sukabumi. Pertemuan ini membahas evaluasi kondisi lapangan serta penyampaian rencana program kerja DPKP untuk tahun anggaran 2026.

Kepala DPKP Budianto, menyampaikan para petugas di lapangan tetap bekerja maksimal meski dengan peralatan seadanya.

Ditegaskan bahwa sebagian besar armada sudah

mulai sering mengalami kendala teknis. Petugas seringkali bertugas tanpa dukungan APD yang layak, termasuk kelengkapan lainnya.

"Kami belum memiliki alat pengisi SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) sendiri dan kekurangan peralatan penyelamatan standar untuk menangani laporan masyarakat seperti evakuasi ular maupun sarang tawon," ungkap Budianto.

Dalam kesempatan itu, Kabid Pemadam Kebakaran Erwin Andri, melaporkan bahwa saat ini hanya tersedia 12 posko pemadam kebakaran di seluruh Kabupaten Sukabumi. Padahal, dengan luas wilayah dan jumlah 47 kecamatan, idealnya Kabupaten Sukabumi memiliki 25 posko, satu posko idealnya melayani dua kecamatan. "Namun



Wabup Sukabumi H Andreas bersama personil Dinas Damkar

saat ini satu posko seperti di Pelabuhan Ratu harus menangani hingga lima kecamatan," ujar Erwin.

Terkait personel, menurutnya DPKP masih kekurangan sedikitnya 66 anggota untuk mencapai standar pelayanan minimal. Merespons laporan tersebut, Wabup H Andre-

as memberikan instruksi khusus kepada perangkat daerah terkait, terutama BPKAD dan Bappelitbangda, untuk memprioritaskan anggaran pelayanan dasar kemanusiaan pada perubahan anggaran mendatang.

"Ini tentang penyelamatan nyawa manusia, baik masyarakat mau-

pun petugas kita di lapangan. Keselamatan anggota juga menjadi prioritas utama," ujar H Andreas.

Wabup juga menekankan pentingnya identitas petugas melalui seragam yang layak. "Marwah pemerintah ada pada performance petugas di lapangan" tambahnya.

Pada pertemuan tersebut dipaparkan juga inovasi layanan digital yang dilakukan DPKP antara lain: Damkar Cermat: Sistem pengaduan masyarakat secara real-time. Serta Fire Visit yakni Layanan penjadwalan edukasi pemadaman bagi sekolah dan instansi.

Di akhir pertemuan ditegaskan bahwa semua jajaran berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan penyelamatan di Kabupaten Sukabumi demi mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. (Yud)

Selidiki Kinerja Instansi Pemkab Mukomuko Ombudsman RI Bengkulu Turun ke Level Bawah

Mukomuko, Jaya Pos

Pada Rabu, 8 April 2026 kediaman ketua nelayan Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Japri kedatangan tim sebuah lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan swasta yang menggunakan dana APBN/APBD. ORI menerima laporan dugaan maladminis-

trasi, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas layanan publik.

Kehadiran lembaga ini menjadi pertanyaan tersendiri oleh ketua nelayan PIM pasalnya, diketahui lembaga ini biasanya mendatangi Instansi pemerintah, namun kali ini untuk menggali informasi yang akurat Ombudsman RI Bengkulu sampai turun hingga level paling bawah.

Selama kehadirannya, Ombudsman menanyakan kinerja serta



Tim Ombudsman RI Bengkulu sambangi kediaman Ketua Nelayan PIM

pelayanan publik salahsatu instansi pemerintah yakni Dinas Kelautan Mukomuko tentang pelayanan kususnya bagi nelayan di daerah itu.

Tim ORI Bengkulu pertanyakan terkait sistimatik penyaluran bantuan jenis alat tangka yang didanai baik dari APBD maupun APBN, penyaluran asuransi jiwa bagi nelayan yang ditimpa musibah serta berbagai pertanyaan berkaitan dengan nelayan termasuk keluhan yang dirasakan nelayan PIM.

Ketua nelayan PIM Japri yang baru menjabat lebih kurang satu tahun itu menanggapi, menurutnya bentuk perhatian dan pelayanan Dinas Kelautan terhadap nelayan PIM sangat memuaskan sesuai kebutuhan nelayan sebagai mana mestinya baik penyaluran bantuan maupun pelayanan publik lainnya.

"ORI mengharapkan laporan sekiranya ditemukan gejalangan darinas terkait dalam bentuk apapun yang menjadi keluhan nelayan," imbuh Japri. (Jpr)

10 Ribu Liter Diamankan Polda Riau Bongkar Jaringan BBM Subsidi Ilegal di Pelawan dan Inhil



BBM subsidi ilegal ditangkap Kasubdit IV Tipidter Polda Riau

Pekanbaru, Jaya Pos

Polda Riau membongkar jaringan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Pelawan dan Indragiri Hilir (Inhil). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lebih dari 10.000 liter BBM ilegal serta sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam praktik distribusi dan niaga BBM subsidi secara melawan hukum.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.

"Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. BBM subsidi adalah hak masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, sehingga tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal," ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Pengungkapan pertama dilakukan di sebuah bengkel di Jalan Lingkar, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 5.000 liter Bio Solar yang disimpan dalam 21 jerigen berkapasitas 33 liter serta sejumlah tangki berukuran besar. Polisi menetapkan satu tersangka berinisial ANM yang berperan sebagai pembeli, pengumpul, sekaligus penjual BBM ilegal.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, menjelaskan praktik ini telah berlangsung selama sekitar dua bulan dengan pola yang terorganisir. BBM dibeli dari pelangir dan dijual kembali dengan margin keuntungan tertentu.

"Tersangka juga menggunakan modus kendaraan dengan pelat nomor berbeda untuk mengakali sistem barcode saat pengisian di SPBU," jelasnya.

Selain itu, BBM ilegal tersebut dipasarkan ke wilayah pedalaman, termasuk untuk kebutuhan kendaraan operasional seperti truk pengangkut kayu.

Sementara itu, pengungkapan kedua dilakukan di Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Polisi menemukan kapal kayu KM Surya yang mengangkut Bio Solar tanpa dokumen resmi. Dari pemeriksaan, BBM diketahui berasal dari SPBU nelayan di wilayah Concong.

Petugas menemukan 21 drum berisi sekitar 5.000 liter Bio Solar di kapal tersebut. Jika ditotal dengan temuan di ponton lain, jumlah BBM mencapai lebih dari 10.000 liter. Tiga tersangka turut diamankan, yakni pemilik kapal, nakhoda, dan anak buah kapal.

AKBP Teddy menyayangkan adanya penyimpangan distribusi dari sektor nelayan yang seharusnya dilindungi. "BBM untuk nelayan seharusnya digunakan mendukung aktivitas ekonomi mereka, bukan diperjualbelikan secara ilegal," tegasnya.

Polda Riau menyatakan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut serta aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. (AH)

Hadiri RUPS Bank Sumut

Bupati Simalungun Tegaskan Dukungan Penguatan Modal Dorong Ekonomi Daerah

Simalungun, Jaya pos

Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih bersama kepala daerah lainnya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut, berlangsung di aula kantor pusat Bank Sumut, Medan, pada Senin (6/4/2026).

Hari itu menjadi momen penting bagi peta keuangan daerah Sumatera Utara, sekaligus untuk menyatukan komitmen dalam memajukan bank milik masyarakat Sumatera Utara ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, memaparkan sejumlah keputusan strategis yang diambil. Salah satu poin utama adalah kesepakatan untuk mengalokasikan kembali 15 persen dividen sebagai tambahan setoran modal dari seluruh pemerintah daerah pemegang saham.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan komitmen besar dengan melakukan penambahan modal sebesar Rp100 miliar, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp70 miliar.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk memperkuat Bank Sumut sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Dari dividen yang dibagikan, 15 persen kami kembalikan sebagai setoran modal, dan kami dari provinsi juga menambah Rp100 miliar," ujar Bobby tegas.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat struktur permodalan Bank Sumut yang saat ini telah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Penguatan ini menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi bank agar dap-



Bupati Simalungun hadir acara penguatan modal untuk dorong ekonomi daerah

at naik kelas dari KBMI I ke KBMI II, sekaligus memenuhi target regulator menuju modal inti sebesar Rp6 triliun pada tahun 2029.

"Masih diperlukan sekitar Rp800 miliar lagi, dan ini akan kita capai melalui sinergi seluruh pemerintah daerah. Bank Sumut harus tumbuh lebih kuat agar mampu memeri dari provinsi juga menambah Rp100 miliar," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa hasil RUPS ini menjadi titik balik penting dalam memperkuat fundamental bisnis dan daya saing bank di tingkat nasional. Menurut-

nya, keputusan strategis ini mencerminkan kepercayaan tinggi para pemegang saham terhadap kinerja yang telah dicapai.

"Penguatan modal tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga secara langsung meningkatkan nilai investasi pemerintah daerah sebagai pemegang saham," ujar Heru.

Heru menjelaskan bahwa tambahan modal tersebut akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor-sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah. Bank Sumut berkomitmen untuk terus berinovasi dalam layanan dan pro-

duk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif.

Di tengah forum tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan sikap tegasnya. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis penguatan permodalan ini.

"Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai pemegang saham terus mendukung langkah strategis penguatan modal Bank Sumut. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendorong Bank Sumut menjadi

bank yang lebih kuat, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah," ujar Bupati Anton.

Menurutnya, keputusan untuk mengalokasikan kembali sebagian dividen sebagai tambahan modal adalah langkah yang sangat tepat. Hal ini dinilai akan memperkuat struktur keuangan serta meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

"Kami berharap dengan penguatan permodalan ini, Bank Sumut semakin optimal dalam mendukung UMKM, sektor pertanian, serta program prioritas pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun," pungkasnya. (Erwinsah Sinaga)

Wabup Katamso Pimpin Apel Gabungan Yang Digelar di Halaman Mall Pelayanan Publik

Kualatungkal, Jaya Pos

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Dr. Katamso, S.A., S.E., M.E., memimpin apel gabungan yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tanjabbar, Senin (06/04/26).

Apel tersebut diikuti oleh jajaran Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Dalam arahnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

"Apel ini bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi ajang refleksi atas kerja keras kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Wabup Katamso juga memaparkan sejumlah capaian indikator mak-



Wabup Katamso Saat Pimpin Apel Gabungan

ro daerah tahun 2025. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,12 persen, angka kemiskinan 9,67 persen, serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 67,83 persen. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih banyak tugas yang per-

lu diselesaikan bersama. Inspektorat diminta terus memperkuat fungsi pengawasan, sementara Dinas Dukcapil didorong mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui verifikasi dan pembaruan data kependudukan.

Di sisi lain, PTSP yang telah melampaui target investasi diharapkan terus meningkatkan capaian tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menunjuk-

kan tren positif juga perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui penyediaan data yang akurat sebagai daya tarik bagi investor.

Menutup arahnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pemimpin yang harus mampu menjadi teladan, baik dalam sikap maupun kinerja.

"Kekuasaan bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keteladanan. Power is not only about authority, but about leading by example," tegasnya.

Wabup Katamso juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun, sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Plh. Inspektur, Kepala Dinas Perizinan, Kepala BKAD, Kepala Dinas Dukcapil, para sekretaris, Inspektur Pembantu (Irban), pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Buatlah judul yang menarik.

(Tenk/Kominfo- Tjb)

Munjirin Tekankan Disiplin ASN dan Respons Cepat Aduan Warga di Jakarta Timur



Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, saat senam bersama ASN.

Jakarta, Jaya Pos

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan pentingnya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.

Arahan itu disampaikan saat kegiatan senam bersama di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026). Kegiatan rutin tiap Jumat ini diikuti ASN

dari berbagai unit kerja, mulai suku dinas, kecamatan, hingga kelurahan, khususnya yang tidak menjalankan Work From Home (WFH).

Dalam kesempatan tersebut, Munjirin menyoroti pentingnya respons cepat dan tepat terhadap aduan masyarakat. Ia meminta seluruh ASN, baik di kelurahan, kecamatan, maupun suku dinas, untuk menindaklanjuti setiap laporan warga

secara tertib, akuntabel, dan sesuai aturan.

Menurutnya, penanganan aduan tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hal itu dinilai penting agar pelayanan publik berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan warga.

"Saya sampaikan terkait aduan masyarakat harus dipahami dan dilaksanakan ASN

di semua tingkatan. Penanganannya harus benar-benar sesuai fakta. Kita harus melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.

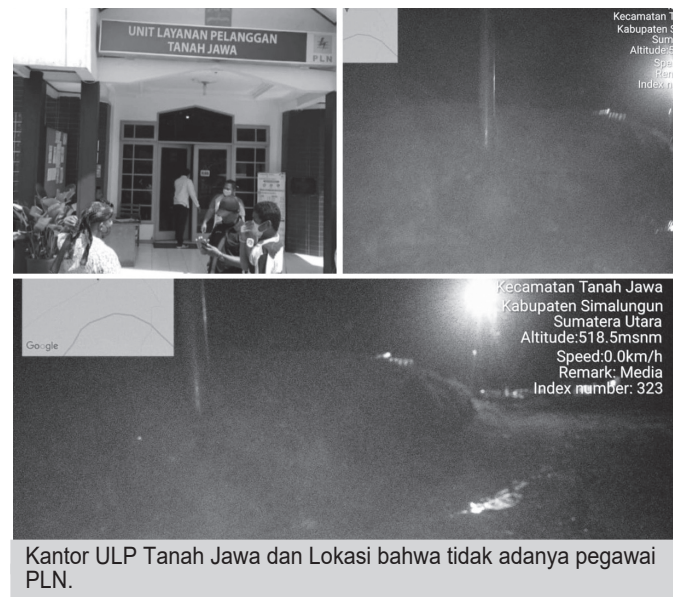
Munjirin menambahkan, kedisiplinan dan tanggung jawab ASN menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

(Jiston)

Listrik Padam di Tanah Jawa, Dugaan Informasi Tak Akurat dari Oknum PLN Picu Sorotan

Simalungun, Jaya Pos

Pemadaman listrik di wilayah Tanah Jawa, Kamis (9/4/2026), memicu sorotan publik. Bukan hanya soal gangguan listrik, warga juga mempertanyakan keakuratan informasi yang disampaikan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sorotan mengarah ke Manager ULP Tanah Jawa, Andreas Karo-karo, yang diduga menyampaikan informasi tidak sesuai kondisi di lapangan saat gangguan terjadi. Dalam pesan WhatsApp sekitar pukul 19.45 WIB, Andreas menyebut petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan teknis. "Sudah di lokasi mereka, bang. Lepas FCO simpang," tulisnya. Namun, hasil pengecekan di lapangan oleh tim media tidak menemukan keberadaan petugas PLN di titik yang dimaksud. Tidak terlihat



Kantor ULP Tanah Jawa dan Lokasi bahwa tidak adanya pegawai PLN.

aktivitas perbaikan, sementara listrik masih padam. Kondisi ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Satgas Bara Hati Indonesia. Ketua Satgas, Ramlan

Sirait, menilai kejadian tersebut sebagai persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti. "Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan kejelasan informasi. Jika

yang disampaikan tidak sesuai fakta, tentu ini merugikan publik," ujarnya. Ramlan meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti di tingkat unit, tetapi ditangani hingga ke level pimpinan wilayah PLN. Ia juga mendorong adanya langkah konkret, seperti evaluasi kinerja ULP Tanah Jawa, klarifikasi terbuka kepada masyarakat, pemberian sanksi jika terbukti ada pelanggaran, serta audit internal terhadap sistem respons gangguan listrik.

Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PLN. Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Warga pun masih menunggu kejelasan, selain pemulihan aliran listrik di wilayah mereka. (Tim)

Perpanjang Rantai Pasok Halaman 1

yang kedua ada pengkondisian tender, sehingga jatuh kepada perusahaan-perusahaan milik atau BO-nya dari tersangka MRC tersebut," ungkap Syarif dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menerangkan, pada periode 2008-2015 terdapat pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Kemudian, tim penyidik menemukan fakta perbuatan terdapat kebocoran informasi-informasi rahasia internal Petral Energy Services (PES) mengenai kebutuhan minyak

mentah dan gasoline. Masih kata Syarif, kebocoran dilakukan oleh salah satu tersangka. Kemudian, salah satu tersangka lainnya, yaitu MRC sebagai beneficial owner dari beberapa perusahaan, bersama dengan tersangka IRW mempengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan.

"Tersangka IRW melakukan hal itu melalui beberapa perusahaan miliknya atau perusahaan-perusahaan terafiliasi dengannya. Jadi pada intinya, saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina," ujar Syarif.

Diungkapkan Syarif, tersangka IRW dan Riza Chalid bersama lima tersangka lainnya melakukan pengkondisian tender serta penyebaran informasi nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Akibatnya, terjadi mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif.

"Untuk mengkomodifikasi kepentingan saudara MRC dan saudara IRW, pada bulan Juli tahun 2012, saudara BBG, saudara AGS, dan NRD, serta MLY mengeluarkan pedoman

yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina," kata bebemnya.

Setelah tender dilakukan sedemikian rupa, lanjut Syarif, PES yang dibantu oleh perusahaan YR melakukan penandatangan MoU terkait pemasokan produk kilang untuk tahun 2012 sampai tahun 2014.

"Proses tender tersebut dilakukan hingga menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga lebih tinggi, terutama untuk produk Premium dan Pertamina," ungkap dia. (Dede)

apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan program konsolidasi tanah, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Camat Pengabuan, Kepala BKAD, Lurah Teluk Nilau, serta masyarakat penerima sertifikat konsolidasi tanah.

(Tenk/Kominfo- Tjb)

Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2025 Halaman 1

pekerjaan disebabkan dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, cuaca ekstrim dan kendala teknis di lapangan.

Yanto menimpali bahwa keterlambatan proyek sangat dipengaruhi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup tambang di Parung Bogor, mengakibatkan material batu dan pasir langka dan harganya melambung tinggi.

Perlu pertimbangan, dampak kebijakan Dedi Mulyadi hanya bersifat lokal, bukan nasional. Pertanyaannya, apakah karena kebijakan Gubernur Jawa Barat maka anggaran harga satuan dan harga kontrak mengalami perubahan?

Mengenai alasan cuaca ekstrim, memang banjir pernah melanda Jakarta beberapa hari, tetapi tidak sampai puluhan hari. Banjir Jakarta bukanlah bencana alam, sehingga tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan. Sedangkan kendala teknis di lapangan, pembatas/pagar pengaman roboh dan sempat dipasang police line

oleh pihak kepolisian bukan alasan kuat juga, karena terjadi hanya pada satu lokasi, tidak berpengaruh pada lokasi lain.

Faktor-faktor diatas oleh Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Disdik DKI Jakarta dijadikan alat menetapkan status force majeure sehingga melepaskan kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dari sanksi administrasi dan penalti. Addendum kedua pun sedang dalam proses. Sebelumnya addendum pertama menyangkut tambah kurang pekerjaan antar lokasi sudah dilaksanakan, tuturnya.

Wawan dan Yanto menambahkan masalah ini sudah dibahas bersama dengan instansi terkait; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Inspektorat DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Lembaga/

instansi pemerintah tersebut dijadikan stempel pengesahan force majeure, bahwa tidak ada masalah kendati pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak. Mereka menjadi benteng/tempat berlindung Disdik DKI Jakarta.

Seharusnya instansi/lembaga tersebut menjadi pengawas internal dan auditor independen.

Berbeda dengan Wawan dan Yanto, Project Manager (PM) Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, Indro yang ditemui Jaya Pos di lokasi proyek mengatakan bahwa perusahaanannya dikenakan sanksi penalti 1% dari nilai kontrak per hari keterlambatan.

Terdapat perbedaan keterangan dari pihak-pihak terkait, sehingga menimbulkan kecurigaan ada patunglipat antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk dan disahkan oleh LKPP, Inspektorat DKI Jakarta, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (Tambunan)

Tidak Ada Diskriminasi di Program Bantuan Halaman 1

Wakil Wali Kota Banjar Supriana, merespons soal bantuan program unggulan Berdaya Didik, yang belum menyentuh siswa madrasah sebagai penerima manfaat.

Padahal Supriana menjelaskan, bahwa program bantuan tersebut tak hanya menasar siswa SD dan SMP kategori tidak mampu. Namun juga, bisa untuk mengkomodir siswa madrasah.

Menurutnya, program Berdaya Didik sudah diatur melalui regulasi. Sehingga, anak sekolah yang masuk kategori tidak mampu, bisa mengakses bantuan pendidikan tersebut.

Ia meminta agar pihak-pihak terkait, baik itu Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama Kota Banjar, saling berkoordinasi terkait mekanisme dan teknis program bantuan tersebut. "Program bantuan Berdaya Didik ini tidak hanya untuk siswa SD dan SMP. Tapi semua warga Banjar siapapun mereka yang masuk kriteria berhak mendapat bantuan ini," jelasnya, Kamis (9/4).

Sementara terkait belum adanya realisasi program Berdaya Didik tahun 2025, ia menyebut, sebetulnya tahun sebelumnya untuk siswa madrasah juga sudah diproyeksikan. Namun, dalam proses pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan tersebut tidak mudah. Selain itu mem-

butuhkan waktu, karena harus sinkronisasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini, katanya, agar calon penerima manfaat yang akan menerima bantuan, betul-betul siswa tidak mampu. Dan juga, siswa yang belum pernah mendapat bantuan dari sumber yang lain sehingga lebih tepat sasaran.

Meski demikian, Supriana menegaskan tidak ada diskriminasi penerima bantuan program Berdaya Didik. Anak sekolah madrasah yang masuk kriteria juga berhak menerima bantuan tersebut. "Kebijakan pemerintah sudah jelas tidak ada diskriminasi calon penerima bantuan. Baik anak sekolah MI, SD, atau MTS, SMP, memiliki hak yang sama," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Banjar Agus Dayusman, meminta kepada Pemkot Banjar agar program Berdaya Didik tidak hanya menasar siswa SD dan SMP, tetapi juga dapat menasar siswa madrasah.

Hal ini, mengingat pada tahun 2025 siswa sekolah madrasah belum tercover bantuan Berdaya Didik, karena kendala teknis pendataan. Saat itu, waktunya sangat mepet dengan tahap realisasi. "Tahun lalu sudah kami data

cuma waktunya sudah mepet sehingga tidak terakomodir," kata Agus, beberapa waktu lalu.

Agus berharap, pada tahun ini siswa sekolah madrasah bisa menikmati program Berdaya Didik. Karena menurutnya, siswa sekolah madrasah juga warga Banjar dan banyak yang harus dibantu. "Kami ingin ini dikawal agar siswa madrasah juga bisa mendapat bantuan Berdaya Didik. Mereka sama-sama warga Banjar dan banyak juga yang tidak mampu," ujarnya.

Kepala Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus saat dikonfirmasi membenarkan tahun lalu untuk siswa madrasah belum tercover program tersebut karena kendala teknis. Saat itu, pihaknya mendapat informasi namun waktunya sudah mendekati realisasi program. Sehingga tidak cukup waktu untuk pendataan dan melengkapi berkas persyaratan calon penerima manfaat.

Pihaknya berharap ada komunikasi terkait itu. Pihaknya juga menyambut baik apabila tahun ini siswa madrasah bisa mendapat bantuan tersebut. "Sementara ini belum ada pemberitahuan ke kami. Harapannya tahun ini siswa madrasah bisa tercover program berdaya didik karena ini sangat mepet dengan tahap realisasi. "Tahun lalu sudah kami data

(Mamay)

Bank Sulteng Cabang Tolitoli Buka Halaman 1

tekanan darah (tensi), tes gula darah, pemeriksaan kadar kolesterol, hingga pemberian obat-obatan secara gratis sesuai hasil pemeriksaan medis. Seluruh proses dilakukan dengan standar pelayanan kesihatan yang baik dan ramah kepada masyarakat.

Kehadiran layanan ini mendapat respons positif dari warga. Sejumlah masyarakat tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut. Salah seorang pengunjung mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Ia sebel-

umnya berencana melakukan pemeriksaan di rumah sakit, namun memilih memanfaatkan layanan gratis yang tersedia di Bank Sulteng.

"Alhamdulillah sangat membantu. Tadinya saya ingin periksa ke rumah sakit, tapi di sini sudah bisa diperiksa gratis. Pelayanannya juga cepat dan ramah," ungkapnya.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam mendeteksi

dini berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kolesterol yang kerap tidak disadari penderitanya.

Dengan adanya layanan kesehatan gratis ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin semakin meningkat. Bank Sulteng Cabang Tolitoli pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah. (Hariyanti)

Bupati Tanjabbar Serahkan 71 Sertifikat Tanah Halaman 1

gram Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa sertifikat tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, sertifikat juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses permodalan.

"Dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat akan lebih mudah mengakses lembaga keuangan, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang dimiliki," ujarnya.

Bupati juga mengimbau masyarakat agar menjaga dan memanfaatkan tanah secara produktif demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap program konsolidasi tanah ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah.

Kelurahan Teluk Nilau menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program konsolidasi tanah dengan luas area mencapai 41 hektare. Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 366/KEP.BUP/BKAD/2025 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kelurahan Teluk Nilau,

Kecamatan Pengabuan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Egi Metri Wilda, S.Si, menjelaskan bahwa dari total sertifikat yang diserahkan, sebanyak 68 merupakan Sertifikat Hak Milik, dan 3 lainnya merupakan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten.

Lebih lanjut disampaikan, tindak lanjut dari program konsolidasi tanah ini akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan usaha tani, balai pertemuan, serta gudang penyimpanan alat dan mesin pertanian.

Di akhir kegiatan, Bupati Anwar Sadat menyampaikan

Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Halaman 1

profesionalisme menjalankan tugas pemasyarakatan.

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Buwanda menambahkan, adanya kebijakan terbaru terkait periodisasi kenaikan pangkat lebih fleksibel. Penambahan periodisasi usul kenaikan pangkat ini sejak 1 Oktober 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

"Sebelumnya pengusulan kenaikan pangkat dilakukan

6 kali setahun, kini diajukan setiap bulan sepanjang tahun memberikan kemudahan dan percepatan bagi pegawai dalam memperoleh hak kenaikan pangkat sesuai kinerja dan persyaratan," ujarnya.

Salah satu pegawai yang menerima kenaikan pangkat, Hasbullah mengungkapkan rasa syukur dan motivasinya untuk bekerja lebih baik. "Kenaikan pangkat ini bukan akhir, tetapi awal untuk memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi instansi," ujarnya. (Yustami)

Wabup Intan Tegaskan Komitmen Pemkab Tangerang Percepat Program Perbaikan RTLH

Tigaraksa, Jaya Pos

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah meninjau langsung progress renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Mursani, warga Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (07/04/26).

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan menegaskan bahwa Pemkab Tangerang berkomitmen mempercepat pelaksanaan program renovasi RTLH dan menambah target penerima manfaat secara bertahap.

"Ke depan kami berencana, pemerintah daerah akan membantu mempercepat memperbaiki ru-

mah tidak layak huni dan menambah target penerima manfaatnya secara bertahap hingga benar-benar layak dan nyaman untuk dihuni," ujar Intan.

Menurut Intan, program renovasi RTLH merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, aman, nyaman dan sehat. "Program pembangunan RTLH ini adalah bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah untuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga," ungkap Intan.

Pihaknya berharap program



Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah meninjau progres perbaikan RTLH di Desa Matagara

renovasi RTLH yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah juga mendapat

dukungan, bukan hanya dari masyarakat namun juga partisipasi aktif dunia usaha.

"Dukungan dan kolaborasi dari masyarakat dan dunia usaha dengan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya tentu sangat dibutuhkan agar renovasi RTLH bisa semakin banyak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan," harapnya.

Selain itu, Intan juga memberi dorongan semangat dan berpesan agar setelah selesai proses renovasi RTLH, penerima manfaat bisa merawat dan menjaga rumahnya dengan baik.

"Nanti selesai direnovasi tolong dirawat dan dijaga agar dapat juga memberikan dampak dan manfaat lainnya bagi ibu beserta

keluarga," pintanya.

Sementara itu, ibu Mursani sebagai penerima manfaat RTLH menceritakan kondisi rumahnya yang diperbaiki. Sebelumnya rumah sudah rusak parah hingga roboh, saat hujan deras air sering masuk ke dalam rumah akibat atap bocor dan saluran air belum tertata dengan baik.

Ibu Mursani juga mengucapkan terimakasih atas renovasi rumahnya. "Alhamdulillah, akhirnya rumah saya bisa diperbaiki, tidak bocor lagi dan aman untuk ditempati. Terimakasih kepada Bu Intan beserta jajarannya yang sudah membantu memperbaiki rumah saya," ucapnya. (Guns)

Peringati Hari Jadi Ke 193 Jajaran Pemkab Simalungun Ziarah ke Makam Raja Marpitu

Simalungun, Jaya Pos

Suasana penuh khidmat menyeliputi perjalanan rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam mengunjungi makam Raja Marpitu untuk berziarah. Sebuah tradisi mulia kembali di gelar yaitu ziarah nasional ke makam para leluhur dan pendiri daerah.

Kegiatan sakral ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Simalungun ke-193 tahun 2026, berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 6 hingga 8 April 2026, menelusuri jejak sejarah di berbagai titik pemakaman raja-raja terdahulu.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih, bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, dan jajaran pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, camat, dan pangulu setempat, bergerak menyangi lokasi-lokasi bersejarah.

Rombongan menziarahi Makam Raja Raya di Kecamatan Raya, Makam Raja Panei di Kecamatan Panombeian Panei, Makam Raja Tanah Jawa di Kecamatan Tanah Jawa, Makam Raja Purba di Kecamatan Purba, Makam Raja Silimakuta di Kecamatan Pamatang Silimakuta, Makam Raja Dolog Silou di Kecamatan Dolog Silou, hingga Makam Raja Siantar Sangnauluh Damanik yang berada di wilayah Bengkalis, Riau, dan Kota Pematangsiantar.

Di setiap lokasi yang disinggahi, rombongan disambut dengan hangat oleh para Juru Kunci, yang merupakan keturunan langsung dan pewaris nilai-nilai luhur para raja. Prosesi adat Simalungun dilaksanakan dengan san-



Bupati Simalungun bersama Wabup ziarah ke makam Raja Marpitu

gat tertib dan penuh hormat, dipandu langsung oleh Djapaten Purba selaku pemangku adat dan cendekiawan Simalungun.

Rangkaian upacara diawali dengan ritual Maranggir dan Mamuhun, yang merupakan doa dan permohonan restu, diakhiri dengan simbolisasi tabur bunga. Secara tradisi, kegiatan ini juga dimaknai sebagai bentuk "mengundang"

para para ahli waris agar turut hadir, meridhai, dan memberkati perayaan Hari Jadi Kabupaten Simalungun yang akan segera dilaksanakan.

Ziarah ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui kegiatan ini, Pemkab Simalungun ingin mempererat ikatan spiritual dan budaya, serta me-

neladani kearifan lokal yang telah diwariskan.

Diharapkan, semangat kebersamaan, nilai-nilai luhur budaya, dan kearifan para pendiri negeri ini dapat terus terjaga. Semua itu dijadikan landasan yang kokoh untuk terus membangun Kabupaten Simalungun menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. (RD)

Bupati Sukabumi H Asep Japar Resmikan Sekber di Sagaranten

Sukabumi, Jaya Pos

Bupati Sukabumi H Asep Japar mengajak semua warga untuk terus menjaga kerukunan dengan terus menjalin silaturahmi dan mempererat persatuan antar warga.

"Mari kita terus menjaga kerukunan di Kabupaten Sukabumi, termasuk di Sagaranten," ujarnya saat meresmikan Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) Sagaranten di area Kecamatan Sagaranten, Kamis (9/4/2026).

Bupati berpesan agar gedung Sekber Sagaranten yang baru saja diresmikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal positif. Terutama untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. "Manfaatkan gedung se-



Bupati Sukabumi H Asep Japar di acara Peresmian Sekber di Sagaranten

bagai tempat bertukar pikiran, bersilaturahmi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah," ucapnya.

Bahkan, bupati punya harapan besar terhadap keberadaan gedung tersebut. Menurutnya, gedung itu bukan sekadar bangunan fisik, namun rumah

besar untuk memperkuat sinergi demi kemajuan Kabupaten Sukabumi. "Inilah wadah kolaborasi antara berbagai organisasi dan elemen masyarakat. Kecamatan lain pun bisa menduplikasi Sekber di Sagaranten ini," ungkapnya.

Peresmian Sekber yang juga dirangkaikan dengan milad syahriahan ke 18 ini, bupati berpesan agar kegiatan tersebut terus dijalankan. Menurutnya, kegiatan syahriahan yang selama ini dilaksanakan di Sagaranten merupakan pondasi kekuatan spiritual. "Tetaplah istiqomah dalam menjalankan kegiatan keagamaan," pesannya.

Sementara itu, Camat Sagaranten R Aksan Brata-diredja mengemukakan, ke-

beradaan sekber merupakan tonggak sejarah di Sagaranten. Apalagi, prosesnya cukup panjang sampai akhirnya terwujud bangunan dua lantai di dekat kantor Kecamatan Sagaranten tersebut.

"Perjalan panjang sampai akhirnya dapat terwujud Gedung Sekber ini. Semua itu diawali dari 2021 oleh warga bersama Camat Sagaranten waktu itu," terangnya.

Dirinya pun berpesan agar gedung tersebut/dijadikan tempat untuk memperkuat kerukunan dan koordinasi antara lembaga keagamaan.

"Mari kita jadikan gedung ini sebagai pusat kolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah," pungkasnya. (Yud)

Polres Way Kanan Amankan Perayaan Paskah 2026 di Gereja Baradatu



Polres Way Kanan amankan Perayaan Paskah 2026 di Gereja Baradatu

Way Kanan, Jaya Pos

Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama rangkaian perayaan Paskah 2026, petugas gabungan TNI dan Polres Way Kanan melaksanakan pengamanan di Gereja Paroki Keluarga Kudus Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, Jum'at (3/4/2026).

Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Martono didampingi Kapolsek Baradatu Kompol Herwin Afrianto yang dihadiri oleh personel Polres gabungan Polres Way Kanan, Polsek Baradatu dan TNI dari Koramil Baradatu.

Adapun rangkaian kegiatan Ibadah Paskah Trisuci Kamis Putih di Gereja dipimpin Romo Aldi OFM yang diikuti jemaat sekitar 5.000 orang dengan tema: Kristus Bangkit membarui kemanusiaan kita (bdk.2 Korintus 5:7)

Kapolsek Baradatu Kompol Herwin Afrianto mengatakan bahwa hal ini memang sudah menjadi salah satu kewajiban dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada saat hari paskah seperti ini.

Petugas disiagakan untuk melakukan penjagaan, mulai dari sterilisasi di dalam gereja, pemeriksaan keamanan bagi jemaat yang hadir, patroli rutin di lingkungan sekitar gereja, hingga pengaturan arus lalu lintas di akses jalan utama.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi kerja sama pengurus gereja dan jemaat dalam menjaga ketertiban selama prosesi berlangsung. "Hingga seluruh rangkaian ibadah selesai, situasi di Gereja Paroki Keluarga Kudus terpantau aman, tertib, dan lancar," katanya menjelaskan. (Suhailli)

SD Yos Sudarso Juara 1 LCC Tingkat Kecamatan Siap Tanding Ditingkat Kabupaten Garut

Garut, Jaya Pos

Lomba cerdas cermat (LCC) merupakan program Bupati setahu sekali, yang dilaksanakan di tiap Gugus tingkat kecamatan dengan peserta masing-masing tiap sekolah diwakili sebanyak tiga orang siswa terpilih, seperti gugus guntur dilaksanakan di sekolah muhamadiyah jalan gunung payung Lio kecamatan Garut kota.

Hasil penjurian tiap sekolah kali ini dilaksanakan ditingkat kecamatan (09/04) dikedung PGRI jl sudirman yang diikuti perwakilan dari 8 gugus yang terdapat dikesamatan Garut kota, kegiatan

ini menjaring satu kelompok peserta yang akan bertanding ditingkat kabupaten tanggal 15/16

Pudin S.Pd M.Pd Korwas Kecamatan Garut kota memaparkan bahwa dirinya berperan sebagai juri sekaligus pelindung, juri sebanperti gugus guntur dilaksanakan di sekolah muhamadiyah jalan gunung payung Lio kecamatan Garut kota.

Hasil penjurian tiap sekolah kali ini dilaksanakan ditingkat kecamatan (09/04) dikedung PGRI jl sudirman yang diikuti perwakilan dari 8 gugus yang terdapat dikesamatan Garut kota, kegiatan



1 SD Yos sudarso mewakili Gugus kiansantang, kedua SDN Kota kulon 1 mewakili Gugus Pratama dan ke tiga sdn muhamadiyah 2 mewakili Gugus Gagak lumayung ke

empat SD Albainah mewakili Gugus Lasminingrat, dari ke empat yang lolos diambil juara ke satu untuk bertanding ditingkat kabupaten pada tanggal 25/16 menda-

tang yaitu SD Yos Sudarso.

Perihal pembiayaan kegiatan LCC pihaknya tidak mengetahui besarnya, karena yang mengetahui hal itu pak Suwarso ketua K3s bersama Bu Lena selaku bendahara, pihaknya juga mengakui ada honor yang diterima namun jumlah angkanya tidak tau, jumlah pengumpulan dananya juga tidak tau, untuk ditingkat kabupaten nanti tidak ada pembiayaan baik dari sekolah juga Gugus karena biaya ditanggung langsung oleh sekolah yang naik dan ikut serta ditingkat kabupaten yaitu SD Yos Sudarso, pungkasnya. (Hartono)

IKA Unpad Cibandar Bersinergi Dengan Pemda Sebagai Bentuk Implementasi Tri Dharma PT

Ciamis, Jaya Pos

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) wilayah Cibandar (Ciamis, Banjar, Pangandaran) menggelar kegiatan silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah di Lembur Galuh, Saung Sawah Desa Sukamaju Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, beberapa waktu lalu.

Kegiatan halal bihalal tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antaralumni sekaligus memperkuat soliditas organisasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat. Sejumlah alumni dari berbagai angkatan turut hadir, meski belum seluruh anggota dapat mengikuti kegiatan.

Ketua IKA Unpad Cibandar Drs HM Soekiman, mengungkapkan bahwa jumlah alumni di wilayah Cibandar saat ini mencapai lebih dari 500 orang yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. "Memang belum semua anggota bisa hadir. Banyak di antaranya berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang tetap menjalankan tugas



x Para alumni IKA Unpad Cibandar gelar silaturahmi Idul Fitri 1447 H. (Foto:Mamay)

▶▶Halaman 11

Lurah Cililitan Bantah Tuduhan Tak Dampingi Kasus PGC, Tegaskan Bukan Kewenangan



Lurah Cililitan, Sukarya,

Jakarta, Jaya Pos

Lurah Cililitan, Sukarya, memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dilaungkan Mochamad Yusuf (MY) soal dugaan tidak adanya pendampingan dalam penyelesaian masalah di Pusat Grosir Cililitan (PGC).

Klarifikasi itu disampaikan Sukarya saat bersilaturahmi dengan insan pers di Kedai Nasi Liwet Gimbal, Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sukarya menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Ia menyebut, lurah tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi atau mengintervensi persoalan yang melibatkan pengelola kawasan komersial seperti PGC.

▶▶ Halaman 11

Wali Kota Pasuruan Monitoring Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pasuruan, Jaya Pos

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi), bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai di lingku-



Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo tinjau kegiatan pemeriksaan gratis.

▶▶ Halaman 11

Bupati Mojokerto Launching Bantuan Pangan Untuk 156.513 WPM

Mojokerto, Jaya Pos

Dalam mengatasi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya untuk menyelaraskan program kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada kegiatan



Bupati saat penyaluran bantuan beras.

▶▶ Halaman 11

Ketua 2 DPC Hiswana Migas Malang Raya Pastikan Stok Elpiji 3 Kg Aman

Pasuruan, Jaya Pos

Ketersediaan LPG subsidi ukuran 3 kg di Pasuruan, tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua 2 DPC Hiswana Migas Malang Raya Dwi Hardono di



Dwi Danardono Ketua 2 DPC Hiswana Migas Malang Raya.

▶▶ Halaman 11

Jembatan Gantung Desa Talang Buai Mukomuko Nyaris Makan Korban



Kondisi Jembatan Gantung Desa Talang Buai Mukomuko saat ini

Mukomuko, Jaya Pos

Jembatan Gantung disalah satu desa di Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yakni Desa Talang Buai dikabarkan kian mengawatirkan pasalnya, kondisi jembatan itu mengalami kerusakan bagian sisi jembatan yang terbuat dari besi itu kini mulai terlihat rapuh bahkan terlihat ada lepas dari dukungannya.

Tidak hanya itu pada besi penyangga lantai jembatan yang terbuat dari papan sudah mulai merapuh bahkan saat dilintasi kendaraan roda empat milik warga setempat nyaris terjun kesungai akibat jerjadi nya lantai jembatan amblas karna usang dimakan usia.

masih menuru warga setempat biasa dipanggil Anton dirinya juga mengalami hal serupa saat hendak membawa orang tua nya berobat ke rumah sakit Mukomuko. Kata Anton, sebelum jatuh korban diri nya

▶▶Halaman 11

Pesantren Darul Istiqamah Pusat Tegaskan Komitmen Lindungi Tanah Wakaf dari Kepentingan Bisnis

Maros, Jaya Pos

Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat akhirnya angkat bicara terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dinamika internal pesantren. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,



Para santri Pesanteen Darul Istiqamah

santri, alumni, dan para pewakaf, Selasa (7/4/2026).

Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Pusat Mufassir Arif Lc MA, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukanlah konflik perebutan harta warisan atau perselisihan keluarga, melainkan upaya menjaga amanah besar berupa lahan wakaf yang telah diberikan

▶▶Halaman 11

Musrenbang RKPDP 2027 Digelar, Wali Kota Binjai Paparkan Tujuh Program Prioritas

Binjai, Jaya Pos

Pemerintah Kota Binjai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Umar Baki, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M. AP.

Musrenbang tersebut mengusung tema optimal-

isasi regulasi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur Raman lingkungan guna mendukung ekonomi kreatif, sektor pariwisata, dan ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 menjadi momentum penting memasuki tahun



Wali Kota Binjai tandatangani berita acara Musrenbang RKPDP Tahun 2027, Kamis (9/4/2026).

▶▶Halaman 11

Kunjungi Kodim 0712/Tegal, Danrem 071/Wijayakusuma Tekankan Disiplin, dan Kesehatan



Danrem 071/Wijayakusuma kol Inf Lukman Hakim, M.Han beserta jajaran Kodim Tegal.

Tegal, Jaya Pos

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan kerja Danrem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han, bersama Ketua Persit Koorcabrem 071 PD IV/Diponegoro, Ibu Inda Lukman Hakim, ke Kodim 0712/Tegal, Rabu (8/4/2026).

Dalam arahannya kepada prajurit, PNS, dan anggota Persit, Danrem tidak hanya menekankan pelaksanaan tugas dan tanggung

▶▶Halaman 11

ASN Prajuritkulon Wajib WFO dan Bersepeda Tiap Jumat, Dukong Penghematan BBM Nasional

Mojokerto, Jaya Pos

Pemerintah Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari kantor (work from office/WFO) setiap hari Jumat, sekaligus mendorong penggunaan sepeda sebagai moda transportasi utama menuju tempat kerja.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, serta mengacu pada arahan Camat Prajuritkulon, Riaji, SH. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik dan penguatan disiplin kerja

aparatur.

Dalam edaran internal yang disampaikan kepada seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan, ditegaskan bahwa setiap hari Jumat seluruh ASN wajib hadir secara langsung di kantor guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tanpa kendala koordinasi.

Selain kewajiban WFO, ASN juga didorong melaksanakan program "Bike to Work" setiap Jumat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan pegawai, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerin-

▶▶Halaman 11



Riaji, SH, Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Apel Pagi Kecamatan Moncongloe Tekankan Disiplin dan Profesionalitas ASN

Maros, Jaya Pos

Pelaksanaan apel pagi di Kantor Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berlangsung khidmat dan tertib dengan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Camat Moncongloe, UPTD BKKBN, BPP Pertanian, Satpol PP, serta Damkar Kecamatan Moncongloe, Senin (6/4/2026).

Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Moncongloe Suhartini, yang dalam amanatnya menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh aparat

sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahnya, Suhartini juga mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, khususnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat sasaran kepada masyarakat.

"Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk menyatukan semangat, menyelaraskan informasi, serta memastikan



Pegawai Kecamatan Moncongloe saat apel pagi

bahwa seluruh pegawai memahami tugas dan prioritas kerja yang akan dilaksanakan selama sepekan ke depan," ungkapnya.

Selain itu, dalam apel pagi tersebut juga disampaikan sejumlah informasi penting terkait agenda dan kegiatan kecamatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan agar seluruh jajaran dapat mempersiapkan diri dan bekerja secara terkoordinasi.

Kegiatan apel pagi ini juga dinilai sebagai sarana efektif dalam meningkatkan komunikasi

internal di lingkungan kerja. Selain menjadi wadah penyampaian arahan pimpinan, apel pagi dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja minggu sebelumnya serta menyusun rencana kerja pada minggu berjalan.

Dengan adanya kegiatan rutin ini, diharapkan tidak terjadi miskomunikasi antarbidang maupun antarpegawai, serta kinerja aparat di Kecamatan Moncongloe dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (HK)

Dorong Sistem Terpadu Hingga Bank Sampah di Nagori dan Kelurahan Pemkab Simalungun Rakor Pengelolaan Sampah Terintegrasi, Terpadu, dan Berkelanjutan



Sekda Kabupaten Simalungun dan Kadis Lingkungan Hidup

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menunjukkan komitmen tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah Terintegrasi, Terpadu, dan Berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil demi merespons kompleksitas persoalan sampah yang mencakup 32 kecamatan serta 413 nagori dan kelurahan di wilayah tersebut.

Suasan penuh kesungguhan itu tercipta di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Selasa (7/4/2026). Dalam paparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Daniel Silalahi, memaparkan berbagai kondisi riil di lapangan.

Daniel mengakui bahwa pengelolaan sampah saat ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala serius, mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana pendukung, hingga tantangan terbesar yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

Selain itu, Daniel mengungkapkan sistem pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih bersifat terbuka juga menjadi perhatian utama yang harus segera dibenahi demi kesehatan lingkungan.

"Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencari solusi konkret," ujar Daniel.

Hadirnya perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup RI Eka Jatnika Arifin, memberikan perspektif penting. Eka menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu strategis yang membutuhkan kolaborasi menyeluruh.

Menurutnya, kunci perubahan terletak pada pergeseran paradigma, dari yang semula hanya fokus membuang dan menumpuk, beralih menjadi mengelola sejak dari sumbernya melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan. "Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu. Peran aktif masyarakat menjadi kunci, termasuk dalam mendorong ekonomi sirkular," tegasnya.

Sementara itu, arahan Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih, yang disampaikan oleh Sekda Mixnon Andreas Simamora, menegaskan dukungan penuh daerah terhadap kebijakan nasional.

Pemkab menargetkan terjadinya transformasi besar, yaitu perubahan sistem pengelolaan di TPA menuju sistem sanitary landfill yang lebih sehat dan modern, sekaligus memperkuat kelembagaan serta kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah di setiap nagori dan kelurahan. Inisiatif ini dinilai sangat strategis sebagai upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat yang sekaligus memberikan nilai ekonomi.

"Kami mengajak kerjasama lintas sektoral, dimulai dari pimpinan perangkat daerah, Camat, Pangulu, dan Lurah harus menjadi motor penggerak dalam membangun kesadaran masyarakat," tegas Sekda.

Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak perubahan menuju tata kelola yang lebih baik. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Kabupaten Simalungun dapat mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi menjadikan Simalungun yang ASRI (Asri, Sehat, Rapi, Indah).

Turut hadir dan memberikan masukan dalam rakor tersebut para pimpinan perangkat daerah, seluruh Camat se-Kabupaten Simalungun, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. (RD)

Momen Lebaran, KPSP Setia Kawan Nongkojajar Gelar Halal Bihalal

Pasuruan, Jaya Pos

Perkuat tali silaturahmi di momen lebaran, Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan gelar halal bihalal, Rabu (1/04/2026).

Nampak hadir rekanan IPS, Ketua MUI kecamatan Tutur, Muspika Tutur, mantan kapengurus dan karyawan, serta juga diikuti oleh para istri pengurus, dan pengawas yang nampak sangat antusias mengikuti kegiatan halal bihalal tersebut dengan mengundang nada dan dakwah ustadz KH Lukman Safii dari Blitar.

Dengan tema "Merajut Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan" tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus, karyawan dan kelompok yang tergabung didalam keanggotaan KPSP Setia Kawan.

Ketua panitia H Farhan dalam sambutannya mengucapkan minal aidzin wal faizin kepada semua jajaran pengurus, para pengawas dan semua tamu undangan yang hadir.

"Semoga kita semua mendapat syafaat, mari kita saling bermaaf-maafan dan sucikan hati, kalau selama ini ada salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja," ujarnya.

Sementara itu, Ir H Sulistianto selaku Ketua 1 KPSP Setia Kawan mengatakan, halal bihalal dilakukan setiap tahun setelah adanya momentum Hari Raya Idul Fitri guna mempererat tali silaturahmi



H Sulistianto beri sambutan di momen halal bihalal

dan persaudaraan.

Tak hanya sekedar bermaaf-maafan, dengan adanya kegiatan ini juga bertujuan untuk saling mendekatkan persaudaraan yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh KPSP Setia Kawan Nongkojajar.

"Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara pengurus, karyawan,

kelompok hingga anggota KPSP Setia Kawan Nongkojajar. Saya mengucapkan Minal Aidzin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada yang merasa kurang berkenan dalam segala tingkah laku maupun ucapan yang sengaja atau yang tidak disengaja," ujar H Sulistianto.

Tidak hanya sebagai bagian dari tradisi, kegiatan ini

juga sebagai upaya memperkuat solidaritas dan sinergitas antar karyawan dan anggota yang didampingi oleh istri saat menghadiri kegiatan.

H Sulistianto menambahkan bahwa semangat Idul Fitri harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan. Tak hanya di KPSP Setia Kawan saja,

namun di lingkup kelompok juga harus solid.

"Acara halal bihalal ini bukan hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas antar pengurus dan anggota dalam menghadapi tantangan pekerjaan ke depan, saya senang melihat semua hadir di acara halalbihalal," imbuh H Sulistianto. (Wiro)

Polres Langkat Gelar Binrohtal, Perkuat Iman dan Integritas Personel

Langkat, Jaya Pos

Polres Langkat menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) pada Kamis (9/4/2026) di Masjid Darussalam dan Aula Jasmine.

Kegiatan ini diikuti seluruh personel dan ASN, termasuk jajaran Polsek, sebagai upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta integritas dalam pelaksanaan

tugas.

Untuk personel Muslim, tausiyah disampaikan oleh H. Amru yang mengajak membiasakan membaca Al-quran sebagai pedoman hidup. Sementara itu, ibadah bagi personel Kristen dipimpin Budi Kasenda dengan pesan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kondisi kehidupan.

Kapolres Langkat AKBP

David Triyo Prasajo, menyampaikan bahwa Binrohtal merupakan agenda rutin untuk membentuk karakter personel yang beriman, profesional, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel mampu menjalankan tugas secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. (Fatimah)



Kegiatan Binrohtal Polres Langkat beragama Islam di Masjid Darussalam, Kamis (9/4/2026).

Perkuat Syiar dan Kebersamaan Umat

Pembukaan MTQ ke-58 Siantar Barat Berlangsung Meriah

Pematangsiantar, Jaya Pos

Suasana khidmat dan penuh semangat keagamaan menyelubungi halaman kantor Kecamatan Siantar Barat, Jl Purba Kelurahan Timbang Galung, dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-58 tingkat Kecamatan Siantar Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, serta masyarakat. Babinsa Kelurahan Timbang Galung, Sertu Hadimin Ramud, hadir mewakili Danramil 04/SB sebagai bentuk dukungan TNI terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Wali Kota Pematangsiantar melalui Asisten I, Kepala KUA Kecamatan



Anggota Polres Pematang Siantar bersama generasi muda

Siantar Barat Iswandi Lubis, Camat Siantar Barat Hermansyah Saragih SH, Kepala Puskesmas Raya M.Jamil, perwakilan Kapolsek, Babinsa, Babinkamtibmas, seluruh lurah se-Kecamatan Siantar Barat, Majelis Taklim, BKM Masjid Raya, selaku UMKM,

serta masyarakat umum yang antusias mengikuti jalannya acara.

Rangkaian acara pembukaan berlangsung tertib dan penuh makna, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan doa bersama, serta menyanyikan

lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ. Acara kemudian diisi dengan sambutan dari Camat Siantar Barat, Kepala KUA, serta Ketua LPTQ yang menekankan pentingnya MTQ sebagai sarana meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan harapan agar kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan generasi muda yang Qur'ani. Selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Keputusan Dewan Hakim sebagai penegasan pelaksanaan lomba yang profesional dan objektif.

Puncak acara ditandai dengan bimbingan dan arahan sekaligus pembukaan resmi MTQ oleh perwakilan Wali Kota Pematangsiantar. Dalam

sambutan, disampaikan bahwa MTQ merupakan momentum penting untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

Kehadiran berbagai elemen, termasuk UMKM lokal, juga menambah semarak kegiatan ini, menjadikannya tidak hanya sebagai ajang religius tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan terselenggaranya MTQ ke-58 ini, diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur'an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. (RD)

Pemkab Ciamis Pastikan Pemberangkatan Haji 2026 Berjalan Lancar



Pemkab Ciamis gelar rapat lintas sektor matangkan kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026M. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis terus mematangkan kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M melalui Rapat Prosedur Tetap (Protap) Pemberangkatan dan Pemulangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Ciamis, Rabu (8/4).

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan seluruh tahapan pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

Mewakili Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis Rudi, menyampaikan rasa hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati H Herdiat Sunarya yang tidak dapat hadir karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam arahnya, Rudi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dari tahun ke tahun guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji, terlebih dengan adanya perubahan sistem pelayanan yang kini semakin berbasis digital.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kesiapan teknis yang telah dipersiapkan harus dapat berjalan optimal mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal.

Selain itu, Rudi mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pelaksanaan ibadah haji. Ia menghimbau seluruh panitia agar melakukan antisipasi sejak dini terhadap kondisi darurat demi menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Ciamis tahun 1447 H/2026 M, meliputi pemberangkatan Kloter 15 KJT, Sabtu (2/5/2026) pukul 05.00 Wib, acara pelepasan oleh Bupati Ciamis dan Kloter 31 KJT, Kamis (14/5/2026) pukul 01.30 Wib, acara pelepasan oleh Bupati Ciamis.

Sementara untuk pemulangan Kloter 15, Landing pada Jumat (12/6/2026) pukul 06.20 Wib dan Kloter 31, Landing Selasa (23/6/2026) pukul 16.00 Wib.

Dengan ditetapkannya jadwal tersebut, Pemkab Ciamis berharap seluruh unsur panitia, stakeholder terkait, serta pihak pendukung lainnya dapat mempersiapkan diri secara maksimal, sehingga pelayanan kepada jemaah haji Kabupaten Ciamis tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, aman, dan nyaman.

Melalui rapat protap ini, pemkab kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah, sekaligus memastikan seluruh proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah berlangsung tertib, lancar, dan penuh keberkahan. (Mamay)

RSUD Ciamis Berkomitmen Turunkan Angka Stunting Secara Signifikan



Direktur RSUD Ciamis dr Bayu Yudiawan

Ciamis, Jaya Pos

Peringatan Hari Anak Nasional tanggal 8 April setiap tahunnya menjadi momentum krusial dalam memerangi angka stunting di Kabupaten Ciamis. Dengan mengusung tema Pemberian Makan Tepat, Cegah Stunting, fokus utama diarahkan pada kualitas asupan nutrisi anak usia 0-5 tahun melalui optimalisasi sumber pangan lokal.

Direktur RSUD Ciamis dr Bayu Yudiawan MM menekankan, kunci utama pencegahan gagal tumbuh kembang bukan pada produk instan yang mahal. Melainkan pada ketepatan pola asuh dan pemanfaatan gizi lingkungan sekitar.

Menurut Bayu, intervensi gizi berbasis pangan lokal merupakan langkah paling realistis dan efektif bagi masyarakat Ciamis. Ia menyoroti pentingnya sinergi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang bergizi seimbang.

Bayu menyebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus RSUD Ciamis dan jajaran kesehatan terkait tahun ini. Pertama Edukasi ASI dan MPASI yaitu memastikan ibu memahami tekstur dan kandungan gizi yang sesuai dengan tahapan usia anak.

Kemudian, optimalisasi pangan lokal yaitu mendorong penggunaan protein hewani dan sayuran yang mudah didapat di pasar tradisional Ciamis. Selanjutnya, pemantauan rutin, jadi mengajak orang tua untuk tidak absen membawa balita ke Posyandu guna mendeteksi dini gejala gagal tumbuh.

RSUD terus berkomitmen menurunkan angka stunting secara signifikan. Harapannya, dengan pemberian makan yang tepat, anak-anak Ciamis tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi. (Mamay)

30 ASN Ciamis Terpilih Ikuti PKA Mandiri 2026

Ciamis, Jaya Pos

Di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat dan penuh ketidakpastian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengambil langkah strategis dengan memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur. Untuk pertama kalinya, Pemkab Ciamis secara mandiri menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I tahun 2026 sebagai upaya mencetak ASN yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan BKPSDM Kabupaten Ciamis tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Dr H Andang Firman Triyadi MT, Senin (6/4), dengan dihadiri perwakilan BPSDM Provinsi Jawa Barat Budi Hermawan, para kepala perangkat daerah, serta 30 peserta pelatihan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Ciamis.

Dalam laporannya, Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis Ai Rusli Suargi SSTP MSi, menyampaikan bahwa pelatihan ini dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertujuan mengembangkan potensi dan memenuhi standar kompetensi jabatan administrator.

Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung mulai 25 Maret hingga 6 Agustus 2026 dengan metode pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri, serta aktualisasi di tempat



Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi secara simbolis menyematkan tanda peserta PKA angkatan I Tahun 2026. (Foto:Mamay)

kerja. Pelaksanaan ini juga menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Kabupaten Ciamis menyelenggarakan PKA secara mandiri dengan penjaminan mutu dari BPSDM Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutan Bupati Ciamis yang diwakili Sekda, menyampaikan permohonan maaf karena bupati tidak dapat hadir secara langsung karena ada agenda kedinasan di Jakarta. Meski demikian, Sekda menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi perubahan yang semakin kompleks. "ASN memiliki fungsi strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sekaligus perekat dan pemer-

satu bangsa. Oleh karena itu, kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural harus terus ditingkatkan," tegas Andang Firman Triyadi.

Sekda juga menyoroti pentingnya peran pejabat administrator sebagai penghubung antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Menurutnya, jabatan administrator memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. "Jabatan administrator adalah jembatan antara kebijakan strategis pimpinan dengan pelaksanaan di tingkat operasional. Jika jembatan ini kuat, maka kebijakan akan berjalan efektif," ujar Andang.

Sekda mengingatkan bah-

wa kondisi global saat ini menuntut ASN untuk semakin adaptif dan inovatif.

Andang menegaskan bahwa meskipun kondisi anggaran daerah terbatas, pelaksanaan pelatihan tetap menjadi prioritas karena pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia aparatur.

Menurutnya, pelatihan ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan ASN di lingkungan pemkab.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Budi Hermawan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan PKA mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Menurut-

nya, pelatihan kepemimpinan menjadi bagian penting dalam membentuk pemimpin yang adaptif dan akuntabel.

Budi mengingatkan bahwa ASN ke depan akan menghadapi tantangan besar, mulai dari integritas, transformasi digital, hingga dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Melalui pelatihan ini, pemkab berharap para peserta mampu mengaktualisasikan kepemimpinan yang efektif serta menghadirkan inovasi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Mamay)

K3S Ogodeide Perkuat Silaturahmi, Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan Lewat Pertemuan Rutin di SDN Bambalaga

Tolitoli, Jaya Pos

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, kembali menggelar pertemuan rutin bulanan pada 11 April 2026. Kegiatan kali ini dipusatkan di SDN Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di wilayah tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala SDN se-Kecamatan Ogodeide. Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis untuk membahas berbagai tantangan dan solusi dalam pengelolaan sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kualitas pembelajaran.



K3S sekolah SDN Bambalaga Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli

Kegiatan resmi dibuka oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Ogodeide. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang intensif antar kepala sekolah di tengah dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang. "Melalui forum K3S ini, kita dapat saling berbagi

pengalaman, bertukar gagasan, dan merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Sinergi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN Bambalaga, Suriyani, S.Pd., selaku tuan rumah, menyampaikan rasa syukur

dan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.

"Kami merasa terhormat karena SDN Bambalaga dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan ini. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam mempererat kebersamaan serta memperkuat kerja sama antar sekolah di Kecamatan Ogodeide," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa terselenggaranya kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi yang baik antar sekolah, serta peran aktif pemerintah desa dalam mendukung dunia pendidikan. Dukungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Bambalaga yang telah menjabat selama dua

periode turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pertemuan K3S. Ia menyampaikan apresiasi atas semangat para kepala sekolah dalam membangun pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di desa tersebut.

Melalui pertemuan rutin ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin efektif dan produktif antar kepala sekolah, serta lahir berbagai inovasi dan program unggulan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus bergerak maju demi kemajuan pendidikan di wilayah Ogodeide. (Hariyanti)

Pemkab Ciamis Bersama BPS Canangkan Desa Cantik 2026

Ciamis, Jaya Pos

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Dr H Andang Firman Triyadi MT di aula kantor BPS Ciamis, Rabu (8/4).

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BPS Ciamis, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas DPMD, Kepala Dinas KB, Kepala Bapperida, Rektor Universitas Galuh, serta para camat dan kepala desa terkait.

Program Desa Cantik merupakan inovasi dari BPS yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola, menganalisis, hingga memanfaatkan data statistik. Melalui program ini, desa didorong menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat

dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Sekda Ciamis menegaskan bahwa data kini bukan lagi sekadar kebutuhan di tingkat kota, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar hingga ke desa. "Desa sebagai ujung tombak pembangunan harus mampu menghadirkan data yang akurat, valid dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Andang Firman Triyadi.

Diungkapkannya, di era teknologi yang semakin maju, kemampuan desa dalam mengelola informasi menjadi sangat krusial. Program Desa Cantik hadir untuk memperkuat literasi statistik di tingkat desa, membentuk agen-agen statistik di akar rumput, serta memperbaiki tata kelola data agar setiap kebijakan berbasis pada bukti nyata. "Pembangunan berbasis



BPS bersama Pemkab Ciamis resmi canangkan program Desa Cantik tahun 2026. (Foto:Mamay)

data juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan daerah yang maju dan berkelanjutan. Selain itu, data yang berkualitas diharapkan mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat desa," ungkap Andang Firman Triyadi.

Sekda Ciamis menekankan bahwa Desa Cantik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian

desa. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri berdasarkan data yang mereka kumpulkan, olah dan analisis.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan dan pencaangan tiga desa sebagai Desa Cinta Statistik tahun 2026, yaitu Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan, Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa, dan Desa Jalatrang

Kecamatan Cipaku.

Kepala BPS Kabupaten Ciamis Ahmad Lukman menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan desa cantik merupakan salah satu perwujudan dari Asta cita presiden Republik Indonesia nomor 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Ia melaporkan bahwa program ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli tahun 2026, melalui pembekalan bagi desa-desa mengenai pengelolaan data sektoral, penguatan literasi statistik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data desa. "Tiga desa yang dicanangkan hari ini merupakan lanjutan estafet dari desa-desa hebat sebelumnya sejak tahun 2021, ke tiga desa ini menapaki jejak untuk menjadi pelopor desa berbasis data selanjutnya," tandasnya. (Mamay)



Diterbitkan Oleh:

PT. Media Cipta Jaya Selaras

SK MENKUM & HAM RI:

Nomor: AHU-19831.40.10.2014

Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337

NPWP No: 70.947.655.0-001.000

SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

PENDIRI:

Toni Limbong, SH.

PENASEHAT:

Letjen TNI (Purn) Dr. Sutiyoso, Tom Pasaribu,

Andar Situmorang, SH. ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.

Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

Pemimpin Umum:

Drs. John Hotman Malau, M.Si

Wakil Pemimpin Umum:

Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Pemimpin Perusahaan:
Toni Limbong, SH. Febrri Oloan Seim Brando, S.AK
Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris Redaksi:
Anrico Pasaribu, ST., SH. Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Manager Pemasaran/Klan:
Pahotan Sinaga Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:

Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu, ST, SH

Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:

A. Ristanto, Micoyan L,

REDAKTUR:

Dede Rostini

DESAIN GRAFIS/IT:

Agus Wiro

PHOTO GRAPHER

Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Riau:

Rikkot Manik Asprin Hutapea

Sumatera Selatan: Bangka Belitung:

Yustami AI

Jambi: Sumatera Barat:

Kusuma Inrda Wijaya Zakirman

Banten: Bengkulu:

Guntur Sihombing Japri

DKI Jakarta: Lampung:

Jama Berutu Suhaili

Jawa Tengah: Jawa Barat:

M. Sofi Hendry Hutagalung

Jawa Timur: Sulawesi Selatan:

Wiro Utomo Muh. Hakim

Kalimantan Tengah: Sulawesi Tengah:

Mandau Suwandi Heriyanti

Kalimantan Barat: Kalimantan Timur:

.....

STAF REDAKSI:

JS. Purba | Jama Berutu | Nelson M. Hutapea,

Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH

| Michael J Manurung | Bedman Tambunan |

LITBANG:

Lamsir Limbong

SIRKULASI:

Nelson Hutapea

PENASEHAT HUKUM:

Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

REDAKSI:

Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003

Kelurahan Kedaung, Kalliangke, Jakarta Barat

Telp: (021) 5406657

e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id

Website: www.harianjayapos.com

REKENING BANK:

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka

Rek. No. : 1148-01-000156-30-1

a/n PT Media Cipta Jaya Selaras

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot

Rek. No. : 0379-01-002054-50-7

a/n Toni Limbong

- Bank BCA Cab. Daan Mogot

Rek. No. : 1984084008

a/n Toni Limbong

BPK-RI Perwakilan Sumut Gelar Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Kabupaten Simalungun TA 2025

Simalungun, Jaya Pos

Suasana penuh kesungguhan menyelimuti ruang Balei Harungguan Tuan Rondahaim, kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya, Sumatera Utara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (sumut), menggelar entry meeting, Senin (6/4/2026).

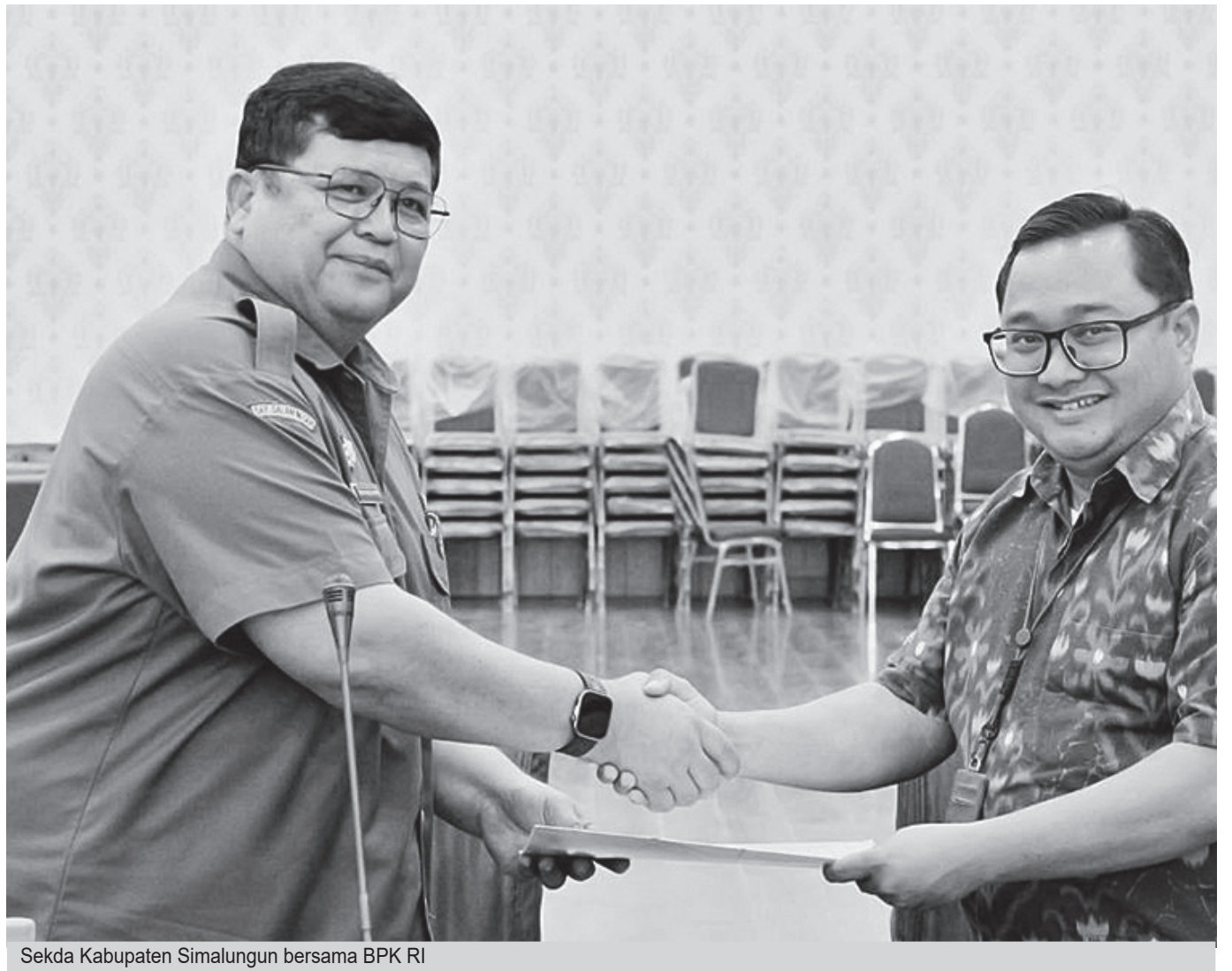
Acara itu menjadi awal resmi dimulainya proses pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2025.

Hadir mewakili Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora memimpin jajaran pimpinan perangkat daerah dalam menerima tim pemeriksa.

Dalam sambutannya, Mixnon menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan tahapan krusial dalam siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mixnon menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun menyambut baik kehadiran tim BPK sebagai mitra strategis. Hal ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara, Widi Widayat, yang menekankan pentingnya sinergi antar-institusi dan dedikasi tinggi demi menghasilkan pemeriksaan berkualitas.

Menurut Mixnon, kolaborasi yang baik akan memberikan dampak nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. "Pemeriksaan ini bukanlah ancaman, melainkan sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap bagaimana kami mengelola keuangan



Sekda Kabupaten Simalungun bersama BPK RI

daerah," tegas Mixnon.

Selanjutnya, Mixnon menjelaskan bahwa setiap temuan yang nantinya dihasilkan harus dijadikan bahan pembelajaran berharga, sementara rekomendasi yang diberikan hendaknya dijadikan peta jalan menuju pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah yang hadir, Mixnon memberikan penekanan khusus. Ia meminta agar momen ini dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mem-

buktikan profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam pelayanan masyarakat.

Disiplin dalam pengelolaan anggaran, ketelitian dalam pencatatan administrasi, serta keberanian untuk melakukan perbaikan dan evaluasi menjadi poin utama yang harus dipegang teguh. "Tujuannya jelas, yaitu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku," pungkas Mixnon.

Sementara itu, Ketua Tim

Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumut Cipta Dwi Sastra, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan kesiapan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Ia juga memberikan pemaparan arahan teknis mengenai ruang lingkup, metode, dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan terinci kepada seluruh perangkat daerah.

Cipta berharap agar dukungan dan kerja sama yang aktif terus terjalin selama proses berlangsung, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan

kesimpulan yang akurat.

Acara diakhiri dengan momen simbolis yang menandai dimulainya tugas. Kepala BPK RI Perwakilan Provsu Paula Henry Simatupang, secara resmi menyerahkan surat tugas kepada Sekda Kabupaten Simalungun.

Penyerahan dokumen ini menjadi bukti tertulis bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran serta kepatuhan pengelolaan keuangan daerah TA 2025 telah resmi dimulai. (RD)

Jika Pemkab Mukomuko Tidak Ada Kepastian

Kuasa Hukum Kampung Nelayan Bandaratu Bakal Bersurat ke Kementrian

Mukomuko, Jaya Pos

Warga Kampung Nelayan di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan legalitas kepemilikan tanah yang mereka tempati.

Permintaan ini disampaikan karena sejak direlokasi oleh Pemda pada 2009, hingga kini sebanyak 63 kepala keluarga belum memiliki kepastian hak milik atas lahan tersebut.

Ketua RT setempat, Pevi Jumadi, mengatakan warga ditempatkan di kawasan itu dengan status hak milik, bukan hak pakai. Namun hingga hampir 17 tahun berlalu, dokumen legalitas belum juga diterbitkan.

"Sudah sekitar 17 tahun kami tinggal di sini, tapi belum mengantongi legalitas hak milik. Padahal sejak awal kami ditempatkan dengan status hak milik," ujar Pevi,



Warga Kampung nelayan Bandaratu Mukomuko minta kepastian Pemkab terkait Legalitas Hak milik tanah

Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, tanpa legalitas yang sah, warga kesulitan melakukan berbagai aktivitas, termasuk pengembangan lingkungan permukiman. Karena itu, pihaknya meminta Pemda Mukomuko segera memberikan kepastian hukum. "Kalau tidak ada legalitas tertulis, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami berharap pemerintah segera menerbitkan hak kepemilikan yang sah," katanya.

Warga juga sepakat menunjuk kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kuasa hukum warga, Delvi, menjelaskan pihaknya tengah menelusuri status aset sejak warga direlokasi pas-cagempa 2007 dan ditempatkan pada 2009. Ia menyebut lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah yang ditempuh adalah mendorong pemutihan atau pelepasan aset

agar dapat dimiliki warga secara sah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perkim, bagian aset, Sekda, hingga Bupati Mukomuko.

"Bupati pada prinsipnya mendukung selama tidak menyalahi prosedur. Kami juga diminta menyiapkan analisa hukum terkait mekanisme pelepasan aset," jelas Delvi.

Analisa tersebut, kata dia, telah disusun, namun hingga kini belum dapat dipresentasikan langsung kepada bupati karena kesibukan agenda. Selain itu, proses koordinasi juga terkendala pergantian pejabat di bagian hukum.

Delvi menambahkan, pelepasan aset harus melalui prosedur yang jelas, termasuk menelusuri asal-usul pengadaan yang diketahui bersumber dari APBN dan telah diserahkan ke Pemda.

"Semua harus sesuai aturan, termasuk persyaratan dari Kemendagri. Itu yang kami tuangkan dalam analisa hukum," ujarnya.

Terkait waktu penyelesaian, Delvi menyebut tidak ada batas pasti karena prosesnya berkaitan dengan birokrasi. Namun, pihaknya akan terus mendorong agar persoalan ini segera tuntas.

Jika upaya di daerah menemui kendala, pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan dengan menyurati kementerian terkait.

Sementara itu, hasil penelusuran terbaru juga memastikan lokasi permukiman warga tidak masuk wilayah kewenangan syahbandar, setelah dilakukan pengecekan dan analisis data.

Namun demikian, kendala lain muncul karena dokumen awal penyerahan aset, seperti berita acara dan nomor register, belum ditemukan di arsip pemerintah daerah.

"Dokumen itu penting sebagai dasar penerbitan sertifikat. Karena belum ditemukan, maka kami gunakan analisa hukum sebagai pijakan," kata Delvi. (Jpr)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Perwakilan Riau:** Aspin Hutapea (Kepala) | **Biro Kampar:** David Hutasoit (Kepala) | **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami AI (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur:** Tengku AR | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala), Sahatar Simarmata (Wakil) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Perwakilan Jawa Tengah:** Nas Sibarani | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto:** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Kota Mojokerto /Jombang:** Totok Setyanto (Kepala) | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan:** Wiro Utomo (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala) | **PERCETAKAN:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika. (Isi diluar tanggungjawab percetakan). Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang. Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473

PWI Pusat Serahkan Berkas Konflik Internal ke Kapolres Jakpus, Dorong Penyelesaian Hukum

Jakarta, Jaya Pos

Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, bersilaturahmi dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung, Jumat (10/4/2026) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Anrico didampingi Ketua Pokja Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Helmi AR. Ia menyerahkan sejumlah dokumen penting terkait penyelesaian persoalan internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), terutama yang muncul saat dualisme kepemimpinan.

Anrico menjelaskan, penyerahan berkas ini merupakan bagian dari upaya mendorong penyelesaian konflik secara administratif dan hukum, sesuai amanat Kongres di Cikarang, Jawa Barat.

"Harapannya, seluruh permasalahan PWI yang terjadi sebelumnya bisa segera diselesaikan secara administrasi hukum," ujar Anrico.



Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, bersilaturahmi dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung, Jumat (10/4/2026) pagi.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen PWI Pusat untuk menata organisasi secara profesional serta menjaga solidaritas di kalangan insan pers.

Selain itu, pertemuan dengan Kapolres Jakarta Pusat diharapkan dapat mem-

perkuat sinergi antara organisasi pers dan aparat penegak hukum. Kerja sama ini dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik.

(Red)

Ketua 2 DPC Hiswana Migas Malang Raya Halaman 7

sela-sela kesibukannya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, ketahanan stok LPG secara nasional berada pada kisaran 20 hari ke depan. Ia menegaskan bahwa stok di tingkat depo yang hanya beberapa hari merupakan bagian dari sistem distribusi yang terus berjalan dan tidak mencerminkan kekurangan pasokan.

Namun secara gamblang Hardono menegaskan bahwa stok elpiji 3 kg tetap ada di setiap harinya dan tidak ada kenaikan. Yakni Rp 18 ribu di tingkat pangkalan.

"Kami memastikan bahwa stok elpiji 3kg tetap aman dan terkendali. Setiap hari ada distribusi ke seluruh agen sampai pangkalan, dan harganya tidak

naik tetap 18 ribu di pangkalan," katanya.

Hanya saja, meski stok aman dan harga tak naik, Ko Han - sapaan akrab Koordinator Hiswana Migas Pasuruan Raya ini mengimbau masyarakat agar jangan panik buying terhadap elpiji maupun BBM.

Sekalipun ingin mendapatkan elpiji 3 kg dengan harga eceran tertinggi (HET), ia mengimbau warga untuk membelinya di pangkalan terdekat.

"Contohnya untuk elpiji 3 kg, setiap rumah bisa memakai 2 tabung saja dalam satu minggu. Gak perlu beli banyak karena stok akan tetap ada, dan kalau pengen HET, ya belinya jangan di toko

klontongan tapi di pangkalan," imbaunya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah dengan tidak menaikkan harga elpiji 3 kg disambut bahagia masyarakat. Ika Rahmawati, warga Kelurahan Sebeni, Kota Pasuruan salah satunya

"Ya alhamdulillah gak jadi naik. Kalau naik ya tambah susah mas, apa-apa sekarang naik semuanya," ungkapnya. Diketahui, Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak menaikkan harga Elpiji 3 kg sejak awal 2026, meskipun terdapat gejolak harga energi global. Harga subsidi tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan resmi.

(Wio)

Bupati Mojokerto Launching Bantuan Pangan Halaman 7

penyaluran bantuan pangan, yang secara simbolis dilaksanakan oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal tersebut berlangsung dengan sangat antusias bagi warga yang tercatat sebagai penerima manfaat.

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dalam sambutannya mengatakan, bantuan pangan yang berupa beras dan minyak goreng tersebut adalah cadangan pangan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 156.513 warga penerima manfaat (WPM).

"Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa bantuan beras dan minyak goreng di

tahun 2026 ini terhitung mulai bulan Februari dan Maret disalurkan pada 156.513 WPM se-Kabupaten Mojokerto," terangnya.

Lebih lanjut bupati menambahkan bahwa para penerima bantuan pangan di periode Februari-Maret 2026 ini masing-masing menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng terhitung dua untuk bulan.

Warga yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, jadi penerima bantuan se-Kabupaten Mojokerto ini sudah ada datanya," tambahnya.

Bantuan pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional ini bertujuan untuk melanjutkan usaha Presiden Prabowo dalam mewujudkan swadaya pangan yang berkelanjutan.

Selain itu di akhir sesinya, bupati juga membeberkan bahwa bantuan yang didistribusikan oleh Bulog kantor cabang Mojokerto itu juga berperan sebagai salah satu usaha untuk menekan harga bahan pokok pasca lebaran Idul Fitri, di tengah situasi konflik global kini. (Ad)

ejahteraan atau desil.

"Penerimaannya adalah yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, jadi penerima bantuan se-Kabupaten Mojokerto ini sudah ada datanya," tambahnya.

Bantuan pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional ini bertujuan untuk melanjutkan usaha Presiden Prabowo dalam mewujudkan swadaya pangan yang berkelanjutan.

Selain itu di akhir sesinya, bupati juga membeberkan bahwa bantuan yang didistribusikan oleh Bulog kantor cabang Mojokerto itu juga berperan sebagai salah satu usaha untuk menekan harga bahan pokok pasca lebaran Idul Fitri, di tengah situasi konflik global kini. (Ad)

(Tok)

ASN Prajuritkulan Wajib WFO Halaman 7

tah pusat terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Sejalan dengan upaya nasional dalam menekan konsumsi energi BBM, penggunaan sepeda oleh ASN dinilai sebagai langkah sederhana

namun berdampak luas, baik dari sisi efisiensi energi maupun pengurangan emisi karbon di perkotaan.

Pemerintah Kecamatan Prajuritkulan berharap kebijakan ini dapat menjadi con-

toh bagi instansi lain serta masyarakat luas dalam menerapkan gaya hidup hemat energi dan ramah lingkungan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

(Tok)

Musrenbang RKP 2027 Digelar Halaman 7

kedua masa kepemimpinan 2025-2030. Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Ia memaparkan tujuh program prioritas, yaitu peningkatan mutu pendidikan dasar, perlindungan sosial masyarakat, layanan kesehatan terpadu, penguatan ekonomi berbasis investasi dan UMK digital, pembangunan infrastruktur hijau, reformasi birokrasi, serta dukungan

terhadap program prioritas provinsi dan nasional.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, investasi, dan penanggulangan bencana.

Sementara itu, Ketua

DPRD Kota Binjai, Gusuar-tini Surbakti, menyebut Musrenbang sebagai forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan pembangunan yang terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan Kota Binjai tahun 2027.

(Fatimah)

Pesantren Darul Istiqamah Pusat Tegaskan Halaman 7

oleh umat untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islam.

Dalam keterangannya, Mufassir Arif menjelaskan bahwa estafet kepemimpinan pesantren merupakan amanah yang sakral dan harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Amanah tersebut diberikan untuk melanjutkan perjuangan pesantren dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Menurutnya, amanah itu bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus melindungi aset wakaf agar tetap digunakan sesuai peruntukannya.

"Pesantren ini dibangun dari keikhlasan para pendiri dan wakaf masyarakat. Amanah ini harus dijaga, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masa depan santri dan umat," ujarnya.

Pihak pesantren juga membantah tegas isu yang menyebut adanya konflik ahli waris di lingkungan internal. Menurut klarifikasi yang disampaikan, informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ia menegaskan bahwa persoalan yang muncul lebih pada perbedaan pandangan dalam pengelolaan lahan wakaf. Na-

mun demikian, prinsip utama yang dipegang adalah bahwa tanah wakaf tidak dapat dijadikan objek kepentingan pribadi maupun bisnis.

Dalam penjelasannya, pimpinan pesantren mengungkapkan adanya dugaan upaya dari pihak tertentu yang ingin mengubah fungsi lahan pesantren menjadi kawasan bisnis perumahan dengan melibatkan pihak pengembang.

Beberapa hal yang disoroti antara lain: Munculnya proyek bertajuk Greenville Darul Istiqamah yang dipromosikan melalui media digital, penjualan klaster perumahan seperti Klaster Fizia dan Klaster Kimia di area yang disebut sebagai lahan wakaf, dan adanya nota kesepahaman (MoU) dengan pihak luar yang memicu polemik.

Langkah tersebut dinilai berpotensi menciderai amanah wakaf serta mengubah fungsi lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi pendidikan dan kepentingan umat.

Sebagai respons, pihak pesantren mengambil langkah tegas dengan menutup akses terhadap aktivitas proyek yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan wakaf, sekaligus melakukan upaya penyelamatan aset pesantren.

"Tanah wakaf bukan milik individu. Ini amanah umat

yang harus dijaga. Jika amanah ini hilang, maka hilang pula kepercayaan masyarakat kepada pesantren," tegasnya.

Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Pusat juga mengimbau masyarakat Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan umat yang dibangun dari doa, pengorbanan, dan keikhlasan para pendiri serta masyarakat.

"Menjaga pesantren berarti menjaga masa depan generasi Islam. Menjaga wakaf berarti menjaga amanah, dan menjaga persatuan berarti menjaga keberkahan daerah," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Mufassir Arif berharap masyarakat dapat memahami persoalan secara utuh serta bersama-sama mengawal amanah wakaf demi keberlangsungan pendidikan Islam di wilayah tersebut. (Hk)

IKA Unpad Cibandar Bersinerg Halaman 7

pelayanan, termasuk di hari Sabtu," ungkapnya.

Dijelaskannya, kegiatan silaturahmi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala dengan lokasi yang bergiliran, sebagai upaya memperkuat jangkauan kebersamaan di setiap wilayah. "Silaturahmi ini kami lakukan secara periodik dengan tempat yang berpindah. Hari ini dilaksanakan di Lembur Galuh, Desa Sukamaju," jelas Soekiman.

Soekiman menegaskan bahwa IKA Unpad Cibandar aktif bersinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak dalam menjalankan pro-

gram sosial kemasyarakatan, sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Sejumlah program yang telah dilaksanakan antara lain pengobatan gratis di Desa Situmandala dan Lakbok, perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Jatnagara dan Limbangan, hingga kolaborasi dengan lembaga sosial seperti Hidayah Berbagi Indonesia (HBI) dan Baznas Kabupaten Ciamis. "Saat ini IKA Unpad Cibandar juga tengah menjalankan program pembangunan masjid di Desa Kadupandak, Kecamatan

Tambaksari, sebagai wujud kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan keagamaan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Soekiman mengajak seluruh alumni, baik senior maupun junior, untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi guna memperkuat solidaritas dan keberlanjutan program. "Kami berharap seluruh alumni dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan agar kebersamaan semakin kuat. Ke depan, kami juga akan melakukan penyerahan kepemimpinan dengan melibatkan lebih banyak alumni muda," katanya.

Organisasi alumni ini, tandas Soekiman, berjalan atas dasar kebersamaan dan kesukarelaan, sehingga keberlangungannya sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota. "IKA Unpad Cibandar diharapkan terus memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan sosial di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran sehingga, kiprah IKA Unpad benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan," tandasnya. (Mamay)

Jembatan Gantung Desa Talang Buai Halaman 7

berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah bertindak untuk mengatasinya.

Anton juga mengungkapkan, jembatan gantung tersebut merupakan urat nadi masyarakat setempat karena masyarakat setempat mayoritas petani seyogyanya jem-

batan ini satu-satunya akses yang lewat guna mengangkut hasil panen mereka," ungkap Anton Tempo hari.

"Sepengetahuan saya, baru camat dan kepala desa yang turun kelokasi guna meninjau kondisi jembatan sementara pihak kabupaten belum terli-

hat bahkan kades wanti-wanti terhadap masyarakat dengan memasang perborden dilokasi agar pengendara R4 apalagi bermuatan untuk melewati jembatan sebelum ada penangan dari pemerintah, sementara pengendara R2 tetap hati-hati," kata Anton.

La juga berharap sebelum ada korban berjatuh pihak pemerintah secepatnya melakukan tindakan termasuk demi kelancaran para petani dalam mengangkut hasil panen kelapa sawit maupun petani sawah," tandas Anton. (Jpr)

Lurah Cililitan Bantah Tuduhan Tak Dampingi Kasus PGC Halaman 7

"Permasalahan itu sudah lama dan sudah diklarifikasi di tingkat kota. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran, sehingga kasus dinyatakan selesai," ujar Sukarya.

Ia menjelaskan, peran lurah lebih pada pelayanan administratif kepada masyarakat, bukan sebagai pendamping hukum dalam sengketa dengan pihak swasta.

Sukarya juga mengaku sempat dipanggil pihak pemerintah kota terkait laporan lain yang menyangkut dugaan pernyataannya. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak disengaja dan terjadi saat menjelaskan kronologi kejadian.

"Ke depan ini jadi pembe-

lajaran agar saya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi," katanya.

Menurut Sukarya, pihak kelurahan telah menerima dan menindaklanjuti laporan MY sesuai prosedur. Namun, karena objek permasalahan berada di area pengelolaan swasta, kewenangan penyelesaian buing berada di kelurahan.

"Kalau tidak puas, bisa ditempuh melalui jalur hukum. Kami tidak bisa bertindak di luar kewenangan," tegasnya.

Sementara itu, staf Pemerintahan Kelurahan Cililitan berinisial R menyebut pihaknya telah menerima laporan MY dan mendengarkan kelu-

han yang disampaikan. Namun, permintaan agar lurah turun langsung mendampingi ke PGC dinilai tidak sesuai aturan.

"Lurah tidak punya kewenangan mendampingi sengketa warga dengan pihak swasta. Itu sudah kami jelaskan," ujarnya.

R juga menyinggung adanya kejangalan dalam laporan MY, termasuk nilai tuntutan ganti rugi serta bukti yang dinilai belum memadai. Ia menyebut, pihak pengelola PGC sebenarnya telah membuka ruang komunikasi, namun belum tercapai kesepakatan.

Diketahui, polemik ini

Wali Kota Pasuruan Monitoring Kegiatan Halaman 7

ngan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Kamis (9/4).

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan, seperti pemeriksaan laboratorium, kesehatan gigi dan mulut, hingga pemeriksaan jantung. Mas Adi menyampaikan bahwa

kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Pasuruan dalam mendukung program strategis nasional, khususnya di bidang kesehatan.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama Forkopimda, Pak Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim, Sekda, dan seluruh

OPD yang mendampingi, melaksanakan monitoring pemeriksaan kesehatan gratis," ujar Mas Adi.

Menurut Mas Adi, program pemeriksaan kesehatan gratis memiliki peran penting dalam upaya mitigasi risiko kesehatan di masyarakat.

Kunjungi Kodim 0712/Tegal, Danrem 071 Halaman 7

jawab, tetapi juga pentingnya menjaga keseimbangan antara pengabdian, keluarga, dan kesehatan.

Di hadapan seluruh jajaran, Danrem mengajak prajurit untuk terus mendukung dan menjalankan program satuan, seperti KDKMP, pembangunan jembatan gantung, serta ketahanan pangan. Program-program tersebut menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan dengan rakyat.

Menghadapi dinamika situasi yang terus berkembang, prajurit diingatkan untuk tetap waspada terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa terkait isu-isu aktual. Dalam kondisi apa pun, profesionalisme dan kesiapsiagaan harus tetap menjadi pegangan utama.

Di sela arahnya, Danrem

juga mengajak seluruh prajurit untuk senantiasa bersyukur. Menurutnya, rasa syukur merupakan fondasi penting dalam membangun mental yang kuat serta menjaga semangat dalam menjalankan tugas pengabdian.

Penekanan tegas turut disampaikan terkait disiplin. Setiap prajurit diingatkan untuk menjaga segala bentuk pelanggaran, sekecil apa pun, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, praktik beking, maupun tindakan lain yang dapat merusak nama baik institusi.

"Pegang teguh Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI dalam setiap langkah pengabdian," tegasnya.

Lebih lanjut, Danrem menyoroti pentingnya keharmonisan keluarga. Prajurit diharapkan mampu mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik, termasuk dalam hal ekonomi, agar tidak menim-

bulkan persoalan yang dapat berdampak pada pelaksanaan tugas.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama. Danrem menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal dasar dalam bertugas, sehingga kepedulian terhadap kondisi fisik harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ibu Ina Lukman Hakim dalam arahnya kepada anggota Persit mengajak para istri prajurit untuk senantiasa mendukung tugas suami, menjaga keharmonisan keluarga, serta mendidik anak dengan baik. Ia juga mengingatkan agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks.

Pada kesempatan tersebut, Danrem turut memberikan penghargaan kepada dua prajurit teladan Kodim 0712/Tegal, yakni Mayor Arh (Har

Asep Kuswara, Danramil 11/Pangkajene, dan Serda Laico, Babinsa Koramil 12/Jatinegara. Selain itu, tali asih juga diserahkan kepada para Warakawuri sebagai bentuk perhatian dan kepedulian.

Kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lokasi KDKMP di Desa Lumingsar, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, serta pemberian bantuan sosial kepada warga sekitar. Rombongan juga meninjau pembangunan jembatan gantung di Desa Gembonganti, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Kunjungan kerja ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara. (Nas Sibarani)

Bersama Pemkab Simalungun, TNI, Polri dan DPRD Pembangunan Jembatan Nagori Bosar Galugur Terealisasi

Simalungun, Jaya Pos

Semangat pembangunan terus digalakkan di Kabupaten Simalungun, sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama atau ground-breaking pembangunan Jembatan Aramco.

Acara berlangsung khidmat namun penuh harapan di Huta V Panamban, Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, pada Senin (06/04/2026).

Suasana semakin meriah dengan kehadiran berbagai unsur pimpinan daerah. Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun didampingi Dandim 0207/Sml, Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, serta jajaran Forkopimda lainnya. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa.

Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, momen ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Rangkaian acara dipadukan dengan pemberian tali asih kepada masyarakat setempat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persit ke-80. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian dan kedekatan antara instansi pemerintah dan TNI dengan warga.

Dalam sambutannya, Se-



Dandim 0207 Simalungun, Sekda, Kapolsek Tanah Jawa bersama anggota DPRD Simalungun

cretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menegaskan pentingnya keberadaan jembatan ini. Menurutnya, infrastruktur ini memiliki nilai strategis yang besar dalam membuka akses antarwilayah. "Pembangunan Jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Dandim 0207/Sml. Ia me-

nilai bahwa pembangunan ini sejalan dengan program nasional yang bertujuan mengintegrasikan dan menghubungkan aktivitas perekonomian hingga ke tingkat pedesaan, sekaligus menjadi penunjang utama ketahanan pangan daerah.

Antusiasme dan rasa syukur juga terpancar dari masyarakat setempat. Melalui perwakilannya, warga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian pemerintah dan seluruh pihak

terkait. Kehadiran jembatan ini dinanti-nantikan karena dinilai akan sangat membantu meringankan beban dan mempermudah aktivitas sehari-hari.

Dengan dimulainya pembangunan ini, harapan akan konektivitas yang lebih baik dan roda ekonomi yang semakin berputar kian nyata. Kehadiran Jembatan Aramco nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Si-

malungun.

Turut hadir memeriahkan acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Jepra Manurung SH, Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung SH, unsur TNI-Polri, Camat Tanah Jawa yang diwakili Kasi Trantib Rinaldi Samosir SH, Pangulu Nagori Bosar Galugur Pahatan Manurung, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan ratusan warga setempat.

(RD)

Kapolda Riau Serahkan 20 Mesin Ketinting untuk Nelayan Meranti

Kepulauan Meranti, Jaya Pos

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan bantuan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026). Bantuan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong peningkatan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Aula Tanya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip. Mesin tersebut diberikan kepada 20 nelayan yang dinilai membutuhkan dukungan sarana untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.



Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga hadir sebagai pelayan dan pengayom yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya men-

jaga kamtibmas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujar Herry.

Ia menambahkan, masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang perlu didukung dengan fasilitas memadai agar mampu berkembang secara mandiri. Bantuan mesin ketinting ini diharapkan men-

jadi pengungkit produktivitas sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi lokal.

"Kita ingin masyarakat pesisir terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada," lanjutnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jambu madu dan mangga sebagai bagian dari implementasi konsep Green Policing. Langkah ini menjadi simbol bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Camat Rangsang Barat Jefri, mengapresiasi perhatian Kapolda Riau terhadap masyarakat pesisir. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu nelayan dalam meningkatkan

aktivitas dan hasil tangkapan mereka. "Bantuan ini sangat bermanfaat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.

Hal senada disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faruqi. Ia menilai bantuan tersebut tepat sasaran dan berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta memastikan program-program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan antusias dari warga setempat dan berlangsung dalam suasana aman serta kondusif. (AH)

Bandara Mukomuko Ditumbuhi Semak Belukar Warga Terancam Dari Binatang Buas

Mukomuko, Jaya Pos

Warga Kampung Nelayan RT 07 Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu meminta Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Mukomuko peduli terhadap masyarakat sekitar terutama terhadap warga kampung nelayan yang bersepedaan dengan landasan pacu Bandara.

Permintaan ini disampaikan dikarenakan pagar pembatas landasan pacu Bandara

tepat berada di sisi perumahan kampung nelayan ditumbuhi semak belukar sepanjang pagar pembatas ini dikuatirkan jadi sarang binatang buas yang dapat membahayakan masyarakat setempat.

Ketua RT kampung nelayan kampung nelayan Bandaratu Pevi

Jumadi sangat mengharapkan perhatian dan kepedulian pihak Bandara untuk dapat secepatnya melakukan tindakan pembersihan semak belukar sepanjang pagar pembatas.



Pagar pembatas Bandara Mukomuko ditumbuhi semak belukar

"Demi menjaga keamanan serta keselamatan warga saya diharapkan ada perhatian

mengambil tindakan serius seolah-olah terkesan pembiaran ungap Pevi kepada media ini

ketika ditemui di perumahan nelayan.

Ditegaskannya, sekira terjadi korban sama warga saya siapa yang akan bertanggung jawab," kata ketua RT kesal.

"Saya menduga pihak Bandara minim kepedulian terhadap lingkungan khususnya kami yang berdampingan dengan landasan. Tambah lagi dipandang umum pun tidak bagus masa bandara ditengah kota kabupaten di kelilingi semak belukar," imbuh Pevi.

(Jpr)

Sebanyak 300 Siswa SMAN I Blambangan Umpu TP 2025-2026 Dilepas



SMA Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menggelar pelepasan dan wisuda siswa kelas XII tahun pelajaran 2025/2026

Way Kanan, Jaya Pos

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Lampung, menggelar acara pelepasan/wisuda siswa kelas XII Tahun Pelajaran (TP) 2025-2026, sekaligus penyerahan kembali kepada orang tua/wali siswa, di Gedung Serba Guna (GSG) pemkab setempat, Kamis (11/3/2026).

Wisuda purna siswa tahun 2025-2026 yang bertema, "Raihlah Kesuksesan Dengan Mewujudkan Mimpi Menjadi Karya Nyata" tersebut, dihadiri Pengawas Sekolah dari Provinsi Lampung Sugeng, Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMAN 1 Blambangan Umpu, Kepala SMP negeri, Tokoh Masyarakat, Uspika, Lurah Blambangan Umpu, Komite, perwakilan KUA dan para wisudawan serta tamu undangan.

Rangkaian acara wisuda purna siswa ini dimeriahkan dengan berbagai hiburan persembahan dari sanggar tari SMAN 1 Blambangan Umpu. Dalam kesempatan tersebut pihak sekolah juga memberikan apresiasi kepada siswa-siswi berprestasi atau yang meraih nilai tertinggi, siswa berprestasi non akademik, serta yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kepala SMAN 1 Blambangan Umpu Sunaryo, pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua undangan yang hadir. Ia juga menjelaskan, sebanyak 300 siswa-siswi kelas XII SMAN 1 Blambangan Umpu siap mengikuti wisuda purna siswa. Tentu semua rangkaian acara ini dapat terlaksana sukses berkat kerjasama seluruh warga sekolah.

"Dari 300 wisuda siswa ini, 8 siswa yang telah lulus jalur prestasi,

sementara siswa lainnya sedang mengikuti tes untuk masuk di suatu perguruan tinggi demi melanjutkan studi masing-masing. Dengan demikian kami berharap semoga siswa-siswi yang sedang berjuang memasuki perguruan tinggi dapat lolos dan diterima," harapnya.

Sunaryo lebih lanjut mengemukakan, selama tiga tahun telah mendidik anak-anak, dan kali ini semua setelah diwisuda akan diserahkan kembali kepada wali atau orang tua murid.

Ia juga tak lupa menyampaikan terimakasih kepada seluruh wisuda purna siswa, yang telah mendonasi dananya untuk pembangunan Mushola SMAN 1 Blambangan Umpu.

Di akhir pidatonya, kepala sekolah menyampaikan ucapan terimakasih kepada panitia penyelenggara atas kerja samanya, sehingga semua rangkaian acara berjalan dengan sukses.

Sementara Pengawas Sekolah dari Provinsi Lampung Sugeng, menyampaikan ucapan selamat kepada siswa yang sudah diterima pada perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Dijelaskannya, purna siswa ini bukan berarti perjuangan berhenti sampai disini, tetapi adalah awal kembali untuk meniti sebuah pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, ia berpesan kepada siswa agar memiliki semangat tinggi, mempunyai skill juga berkarier. "Semoga kedepan anak-anak semua menjadi sukses," kata Sugeng.

Pada kesempatan itu, Sugeng menjelaskan bahwa SMAN 1 Blambangan Umpu masih di level B, sehingga dirinya mengajak dan menghimbau kepada dewan guru, kedepan agar lebih bersemangat lagi dalam membina dan membimbing siswa-siswinya.

Suasana bertambah haru saat ucapan terimakasih disampaikan siswa SMAN 1 Blambangan Umpu yang disampaikan oleh perwakilan para wisuda purna siswa.

Acara seremonial diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada wisudawan-wisudawati dilanjutkan foto bersama. (Suhaili)

Suguhkan Gunung Durian Puncak Selamatan Desa Kronto Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Jaya Pos

Sebanyak 1000 durian dijadikan gunung durian pada puncak selamatan desa yang digelar oleh masyarakat Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan yang digelar di halaman Balai Desa Kronto, Minggu (5/4/2026). Jumlah tersebut jauh lebih sedikit bila dibandingkan tahun lalu dengan 5000 buah.

Selamatan desa menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan saat musim durian tiba, dan digelar selama dua hari berturut-turut. Hari pertama diisi dengan khataman Al Qur'an dilanjutkan doa dan tahlil. Sedangkan di hari kedua adalah tasyakuran dengan menghadirkan

gunungan durian sebagai pamungkas acara selamatan desa.

Kepala Desa Kronto Sodin mengatakan, penurunan jumlah durian yang dipajang dalam gunungan disebabkan karena hasil panen yang tidak maksimal. Dalam artian banyak pohon durian yang terkena penyakit serta curah hujan yang begitu lebat yang berakibat rontok, bahkan gagal berbuah.

Selamatan desa biasanya digelar pada bulan ruwah alias sebelum ramadhan. Hanya saja, karena waktunya terlalu mepet maka diundur setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 hijriah. "Biasanya ruwah, sebelum puasa, karena mepet



Seribu durian dijadikan gunung durian pada puncak selamatan desa oleh masyarakat Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/4/2026).

akhirnya diundur jadi sekarang ini," ujarnya seperti dalam siaran tertulisnya Pemkab Pasuruan, Senin (6/4/2026).

Selain gunung durian, setiap RT di Desa Kronto juga memamerkan satu buah ancak yang berisi hasil bumi. Kata Sodin, total ada 22 ancak yang dibawa keliling desa untuk kemudian diperebutkan oleh warga saat selamatan desa. "Setiap satu RT membawa satu ancak. Isinya bebas, yang penting hasil bumi di Lumbang atau khasnya Kabupaten Pasuruan," ucapnya.

Sodin mengaku lega, lantaran warga selalu support Pemdes Kronto untuk melaksanakan ke-

giatan selamatan desa. Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengapresiasi langkah Pemdes Kronto yang senantiasa melestarikan tradisi selamatan desa sebagai agenda tahunan.

Ia berharap, tradisi ini tetap dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Khususnya dengan menghadirkan buah durian yang jauh lebih banyak. "Harapannya, semoga desa kronto menjadi desa yang baldatun toyiyibatun wa robbun ghofur. Warganya damai, aman sentosa dan selamat, tanamannya semakin subur dan buahnya semakin melimpah biar tahun depan bisa lebih meriah lagi," harapnya. (Wio)